LAPORAN PENELITIAN

# PROFIL PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA BARAT

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL 8-11-96
SUMBER/HARGA HD
KOLEKSI KI
NO. INVENTARIS 976/HD196-pl(2)
KLASIFIKASI 338.9 ZUL p:1

Oleh :
**DRS. ZULFAHMI, DIP. IT**
Ketua Tim Peneliti

Penelitian ini dibiayai oleh :
Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang
Tahun Anggaran 1994/1995
Surat Perjanjian Kerja Nomor : 009/PT37.H8/N.1.4.2/1994
Tanggal 15 Juni 1994

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
1995

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

# LAPORAN PENELITIAN

# PROFIL PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA BARAT

*Personalia Peneliti* :

KETUA : DRS. ZULFAHMI, DIP. IT

ANGGOTA : DRS. ALIANIS, MS.

# A B S T R A K

Pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebik dan bersifat multi dimensi. Pertumbuhan dan pemerataan dalam proses pembangunan merupakan salah satu sisi dari ukuran keberhasilan pembangunan tersebut. Diharapkan tidak terjadi trade off antara kedua sisi pembangunan. Artinya jangan terjadi upaya untukj mempercepat pertumbuhan terlaalu mengorbankan aspek pemerataan.

Studi ini mencoba melihat profil pembangunan wilayah Sumatera Barat dengan indikator pertumbuhan, pemerataan, pembangunan sosial dan keberadaan masing-masing sektor ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut dipakai indeks Kuosien Lokasi, Klassen Typologi dan Indeks Williamson. Dalam penerapan model ini diperlukan data skunder nilai tambah masing-masing sektor ekonomi tingkat propinsi dan daerah tingkat II, Jumlah penduduk Indonesia dan Sumatera Barat, pendapatan per kapita Indonesia dan Sumatera Barat. Semua data ini diperoleh dari Laporan Biro Pusat Statistik untuk beberapa kali terbitan.

Berdasarkan metodologi dan model analisa yang dipakai dalam studi ini ditemukan : (1) Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama priode analisa selalu berfluktuasi dan tidak satupun dari sektor ekonomi yang menunjukkan tendensi pertumbuhan yang selalu meningkat. (2) Kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan pendapatan wilayah juga berfluktuasi dan selama periode analisa proses transformasi di Sumatera Barat belum menunjukkan suatu pola yang jelas. (3) Hanya ada 4 sektor ekonomi di Sumatera Barat yang berperan sebagai sektor ekonomi basis, yaitu sektor pertanian, angkutan dan komunikasi, perdagangan, pemerintahan dan jasa. (4) Pada setiap daerah kabupaten pada umumnya sektor pertanian merupakan sektor basis, sedangkan pada daerah kotamadya, sektor ekonomi basis adalah sektor jasa, angkutan dan komunikasi dan listrik, gas dan air minum. (5) Pembangunan dalam bidang ekonomi kurang diikuti oleh peningkatan pembangunan sosial. (6) Sebahagian besar daerah kabupaten di Sumatera Barat termasuk kategori daerah yang kurang berkembang, sedangkan daerah kotamdaya termasuk daerah maju dan berkembang cepat. (7) Pemerataan pembangunan wilayah di Sumatera Barat relatif baik dibandingkan dengan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Disamping itu studi ini dapat membuktikan prediksi teori pertumbuhan Neo Classic.

Penemuan ini memberikan indikasi bahwa upaya untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri sangat diperlukan dalam mempercepat proses transformasi ekonomi di Sumatera Barat. Oleh karena itu kebijaksanaan yang konkrit bagi pengembangan sektor ini sangat diperlukan,



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

seperti kebijaksanaan pengembangan dan pembinaan baik terhadap industri skala menengah dan besar maupun terhadap industri skala kecil dan kerajinan rumah tangga. Kebijaksanaan lain yang perlu diupayakan adalah mengintensifkan dan mengaktifkan kembali tenaga yang bekerja pada institusi pedesaan (Posyandu, Karang Taruna dan PKK) dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berprilaku hidup sehat. Implikasi kebijaksanaan lainnya dari penemuan ini adalah setiap daerah tingkat dua di Sumatera Barat harus memperioritaskan pengembangan sektor ekonomi yang tergolong sebagai sektor basis di daerahnya masing-masing.

# PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ini harus dilaksanakan oleh IKIP Padang yang dikerjakan oleh staf akademiknya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akademik, baik sebagai dosen maupun peneliti.

Kegiatan penelitian ini mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini Lembaga Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana IKIP Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan mutu tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenangan akademik peneliti.

Saya menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi praktek kependidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas yang salah satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambah wawasan dan pemahaman kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil penelitian ini mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun saya yakin hasilnya dapat dipakai sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan di masa yang akan datang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapkan dalam peningkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan.

Hasil penelitian ini telah mengikuti prosedur dan proses pemeriksaan yang berlaku di Lembaga Penelitian IKIP Padang, yaitu melalui telaah tim pereviu usul dan laporan penelitian, yang dilakukan secara "blind reviewing", dan seminar penelitian yang



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

melibatkan dosen senior dan tim Kredit Point IKIP Padang. Mudah-mudahan penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan peningkatan mutu staf akademik IKIP Padang.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu Lembaga Penelitian, Dosen Senior dan anggota tim Kredit Point IKIP Padang yang menjadi pembahas utama dalam seminar penelitian. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Kerja sama yang baik ini diharapkan akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Februari 1995

Ketua Lembaga Penelitian
IKIP Padang

Drs. Kumaidi, M.A., Ph.D
NIP. 130 605 231

# DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| KATA PENGANTAR | ..... | i |
| DAFTAR ISI | ..... | ii |
| DAFTAR TABEL | ..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | ..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | ..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | ..... | 3 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | ..... | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN | ..... | 7 |
| A. Pembangunan Wilayah | ..... | 7 |
| B. Kuosien Lokasi (Location Quotient) | .. | 10 |
| C. Pertumbuhan dan Pemerataan | ..... | 13 |
| D. Kerangka Pemikiran | ..... | 21 |
| BAB III METODOLOGI | ..... | 23 |
| A. Data Penelitian dan Pengukuran | ..... | 23 |
| B. Teknik Pengumpulan Data | ..... | 23 |
| C. Model Analisa | ..... | 24 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | ..... | 25 |
| A. Deskripsi Umum Wilayah Studi | ..... | 25 |
| 1. Kondisi Geografis | ..... | 25 |
| 2. Sumberdaya Lahan | ..... | 26 |
| 3. Sumberdaya Manusia | ..... | 27 |
| B. Profil Pembangunan Wilayah | ..... | 30 |
| 1. Struktur Pertumbuhan Wilayah | ..... | 30 |
| 2. Analisa Potensi Pembangunan Wilayah | ..... | 41 |
| 3. Analisa Potensi Pembangunan Per Wilayah Tingkat II di Sumatera Barat | | 44 |
| 4. Pembangunan Dalam Bidang Sosial | | 48 |
| 5. Indeks Ketimpangan Wilayah | ..... | 54 |

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN ... 59

A. Kesimpulan ..... 59

B. Implikasi Kebijaksanaan ..... 60

DAFTAR PUSTAKA ..... 62



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

# DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 1. Karakteristik PerTumbuhan Wilayah Berdasarkan Klasson Typologi ..... 20

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Barat Menurut Sektor Selama Pelita II, III, IV dan Dua Tahun Pertama Pelita V... 32

Tabel 3. Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Tahun 1984, 1988, dan 1992 ..... 35

Tabel 4. Pertumbuhan dan Pendapatan Perkapita Per Daerah Tingkat II di Sumatera Barat Tahun 1988 - 1992 ..... 38

Tabel 5. Klasifikasi Daerah Tingkat II di Wilayah Sumatera Barat Menurut Klassen Typologi Tahun 1980 - 1992 ..... 39

Tabel 6. Indeks LQ Sektor-Sektor Ekonomi Di Sumatera Barat Tahun 1988 - 1992..... 42

Tabel 7. Indeks LQ Sektor Ekonomi Per Daerah Tingkat II di Sumatera Barat Tahun 1987 - 1991 ..... 46

Tabel 8. Sektor Ekonomi Basis Per Wilayah Tingkat II di Sumatera Barat ..... 49

Tabel 9. PDRB PerKapita Berdasarkan Harga Konstan dan Indeks Kualitas Fisik Kehidupan Per Propinsi di Indonesia Tahun 1990 ..... 51

Tabel 10. Perkembangan Indeks Ketimpangan Pembangunan di Sumatera Barat, Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Secara Keseluruhan Tahun 1970 - 1990 ..... 55

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berencana dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Todaro (1978) mengemukakan bahwa ada tiga nilai hakiki dari pembangunan yaitu: (1) kemampuan bagi semua orang untuk memperoleh kesempatan hidup dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. (2) kesempatan menumbuhkan harga diri. (3) tumbuhnya rasa kebebasan dan meluasnya ruang hidup bebas dari tindasan, kemelaratan, pemerasan dan segala hal yang menghambatan pertumbuhan segenap potensi manusiawi.

Nilai hakiki pembangunan di atas, jika di teliti semuanya tercakup dalam makna pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Repelita di Indomesia. Dinyatakan bahwa pembangunan Nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan atau kepuasan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, melainkan juga keselarasan, keserasian dan kesinambungan yang merata di seluruh tanah air.

Untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah harus berperan aktif sebagai pelaksana kebijaksanaan, sebagai konsumen, produsen, investor, sebagai perusahaan negara dan sebagai pengatur masyarakat (Salim, 1984). Peran

aktif pemerintah ini sangat menonjol pada awal pelaksanaan proses pembangunan dan perhatiannya lebih berat pada bidang ekonomi karena bidang ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan pembangunan di bidang lain (Tjokroamidjojo, 1986).

Ujud konkrit dari peran aktif pemerintah dapat dilihat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Sepertinya Indonesia menargetkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 % per tahun selama Pelita V. Target nasional ini jelas harus didahului oleh pencapaian target oleh setiap daerah tingkat I di Indonesia. Namun yang harus diingat adalah bahwa setiap daerah memiliki potensi alamiah yang berbeda. Oleh karena itu penerapan kebijaksanan sektoral tanpa memperhatikan dimensi tata ruang wilayah diduga akan menimbulkan permasalahan dalam proses pembangunan baik dalam jangka pendek apalagi jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran di atas pengkajian tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap daerah sangat perlu dilakukan dalam rangka menelusuri sektor-sektor ekonomi apa saja yang secara ekonomis layak untuk dikembangkan dan bagaimana keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya maupun pola pertumbuhannya. Di samping itu juga perlu dipelajari struktur pertumbuhan suatu wilayah dan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah. Semuanya ini akan dicoba untuk menyingkapnya

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

melalui suatu studi dengan menetapkan propinsi Sumatera Barat sebagai daerah penelitian.

## B. Perumusan Masalah

Keberhasilan pembangunan suatu daerah disamping ditentukan oleh potensi alamiah yang dimiliki oleh daerah tersebut juga ditentukan oleh kemampuan aparat masing-masing daerah dalam menata perekonomian daerah-nya. Setiap daerah memiliki potensi alami dan insani serta ekonomi yang berbeda. Kondisi ini mengakibatkan setiap daerah memiliki leading sektor ekonomi yang berbeda pula.

Berdasarkan pemikiran di atas, dari dimensi tata ruang wilayah maka setiap daerah harus berspesialisasi dalam menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan potensi ekonomi wilayah yang bersangkutan, dengan demikian akan melahirkan keunggulan komparatif dan pada giliran-nya akan bisa meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Semua ini pada akhirnya akan membuahkan dampak wilayah yang relatif besar dalam proses pembangunan, karena sektor-sektor yang ditata dan dikembangkan adalah sektor ekonomi yang sesuai dengan potensi ekonomi wilayah.

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia bagian barat, dengan luas 42.297,30 ha dan 5.910,20 ha di antaranya sedang diusahakan untuk menunjang kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat (Sumatera Barat dalam Angka, 1990). Laju pertumbuhan ekonomi propinsi ini selama Pelita IV rata-rata 5,29 %

per tahun dan di tahun kedua Pelita V (1990) menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan yaitu 7,06 %, angka ini jauh di atas yang ditargetkan yaitu 5,5 % (BPS, 1990). Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang ada di Sumatera Barat seperti industri (15,89 %), pertambangan dan penggalian (10,50 %), listrik dan air minum (7,13 %), konstruksi (7,43 %), perdagangan (8,37 %), bank dan lembaga keuangan lainnya (7,48 %). Sektor lainnya juga mengalami pertumbuhan tapi angkanya masih di bawah angka pertumbuhan PDRB Sumatera Barat (BPS. 1990).

Dilihat dari segi kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB ternyata sektor pertanian masih mendominasi. Pada tahun 1990 kontribusi sektor pertanian sebesar 31,73 %, perdagangan 24,03 %, industri 12,14 %, angkutan dan komunikasi 9.24 % sedangkan sektor lainnya kontribusinya hanya dibawah 4 % terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat (BPS. 1990).

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bukan berarti perekonomian Sumatera Barat tidak menghadapi permasalahan. Mungkin saja terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh *regional inequality* (ketimpangan wilayah). Kemungkinan lain adalah karena menurut teori pertumbuhan Neo Klasik, pada permulaan proses pembangunan ketimpang-an pembangunan antar wilayah cenderung meningkat, akan tetapi setelah proses

pembangungan berjalan terus dan negara tersebut telah berada pada tingkat yang lebih maju maka ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut secara bertahap akan mulai menurun (Borts, 1960). Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita apakah proposisi ini berlaku bagi perekonomian wilayah Sumatera Barat.

Kemungkinan lain yang mungkin terjadi adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan berarti daerah tersebut lepas dari masalah interregional problems, artinya dalam proses pembangunan itu mungkin saja ada daerah yang relatif cepat perkembangan sedangkan daerah lain mengalami keterlambatan dalam pembangunannya. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa daerah-daerah tingkat II di propinsi Sumatera Barat berbeda tipologinya, ada daerah maju dan ada juga daerah terkebelakang. Tentu hal ini juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana tipologi daerah-daerah tingkat II di propinsi Sumatera Barat. Di samping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh pembangunan di bidang sosial, dan bagaimanapun kondisi ini terjadi dalam proses pembangunan propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana keadaan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Sumatera Barat dari tahun 1970 sampai 1990, apakah proposisi Neo Klasik berlaku bagi perekonomian Sumatera Barat.

2. Bagaimana struktur pertumbuhan wilayah dalam proses pembangunan propinsi Sumatera Barat.
3. Apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diikuti oleh pembangunan dalam bidang sosial.
4. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang secara ekonomis layak untuk dikembangkan dalam perekonomian Sumatera Barat dan daerah-daerah tingkat II di propinsi Sumatera Barat.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

(1) Ketimpangan pembangunan wilayah di propinsi Sumatera Barat.
(2) Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam bidang sosial di propinsi Sumatera Barat.
(3) Karakteristik pertumbuhan per wilayah tingkat II di propinsi Sumatera Barat.
(4) Sektor-sektor ekonomi yang layak dikembangkan di propinsi Sumatera Barat dan per wilayah tingkat II di propinsi Sumatera Barat.

Hasil studi diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembuat kebijaksanaan di dalam merumuskan perencanaan pembangunan propinsi Sumatera Barat pada masa datang, sehingga pengembangan sektor ekonomi yang dilakukan sesuai dengan potensi wilayah. Dengan demikian sumberdaya produktif dapat dimanfaatkan secara optimal.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

# BAB II

# KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## A. Pembangunan Wilayah

Pada hakikatnya pembangunan wilayah merupakan pelaksanaan dari pembangunan nasional pada wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial ekonomi wilayah tersebut serta harus tunduk pada peraturan yang berlaku (Sandy, 1982 a)

Dalam pembangunan wilayah, maka konsep wilayah (region) merupakan aspek penting yang perlu didefinisikan secara tegas, karena konsep ini membawa implikasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan dalam suatu wilayah tertentu. Banyak para ahli Ekonomi Regional yang mengemukakan definisi tentang wilayah. Sandy (1982 a) mengemukakan bahwa kata wilayah yang berkaitan dengan pembangunan suatu wilayah, mempunyai dua makna yaitu: **Pertama**, wilayah objektif, maksudnya adalah suatu wilayah yang oleh para perencana dibagi habis ke dalam beberapa wilayah pembangunan. **Kedua**, wilayah subjektif, maksudnya adalah pengwilayahan merupakan suatu cara untuk mengenal masalah, artinya adanya usaha untuk melakukan klasifikasi.

Wilayah subjektif terdiri dari tiga jenis yaitu wilayah homogen, nodal dan administrasi. Wilayah homogen merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik yang sama secara fisik dan sosial ekonomi. Wilayah nodal merupakan

beberapa pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan wilayah administrasi merupakan wilayah yang didasarkan atas pembagian administrasi pemerintahan seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan.

Dalam pelaksanaan program pembangunan pada suatu wilayah, harus ada suatu institusi yang dapat menuntun arah pembangunan tersebut dan pembangunan tidak boleh menyimpang dari institusi yang ada. Di Indonesia arah pembangunan nasional dirumuskan oleh MPR dan dituangkan dalam GBHN. Pembangunan wilayah juga harus mencakup unsur ini (Sandy, 1982 a).

Pembangunan harus dilihat dalam arti yang dinamis, bukan dilihat sebagai suatu konsep yang statis. Pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Tjokroamidjoyo (1986) melihat proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial budaya. Senada dengan ini Todaro (1983) juga mengemukakan bahwa nilai hakiki dari pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yang meliputi aspek peningkatan kebutuhan hidup, peningkatan harga diri dan bebas dari perbudakan.

Dengan demikian setiap program pembangunan ditujukan ke arah perubahan yang positif dan dalam pelaksanaan merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan suatu interaksi antara alam, sosial ekonomi dan faktor politik. Di daerah-daerah yang kurang memiliki sumberdaya produktif, laju pembangunannya cenderung lamban diban-

ding dengan daerah yang memiliki sumberdaya relatif banyak. Dalam jangka panjang hal ini cenderung menimbulkan ketidakseimbangan struktural antar daerah. Berkaitan dengan hal ini, Becker (1981) mengemukakan bahwa sangat perlu adanya intervensi pemerintah untuk menekan terjadinya ketimpangan struktual antar daerah. Myrdal (dalam Sukirno, 1976) juga mengemukakan bahwa apabila pemerintah tidak secara aktif campur tangan dalam proses pembangunan, hal ini akan menimbulkan akibat buruk bagi proses pembangunan selanjutnya.

Untuk menghindarkan akibat-akibat yang kurang menguntungkan dalam proses pembangunan wilayah, maka sangat diperlukan perencanaan wilayah. Dalam hal ini diperlukan informasi tentang potensi ekonomi wilayah dan masalah sektor-sektor ekonomi yang pantas dikembangkan dalam wilayah yang bersangkutan. Perencanaan wilayah ini pada dasarnya sama dengan perencanaan lainnya, yaitu mencakup suatu proses yang berurutan (Glasson, 1974).

Mengingat pentingnya pembangunan wilayah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka perhatian terhadap pembangunan wilayah dewasa ini semakin berkembang. Seiring dengan hal ini juga berkembangnya teknik-teknik analisis pembangunan wilayah. Richardson (1977) telah mengemukakan teknik-teknik analisis tersebut antara lain: Multiplier Regional, Basis Ekonomi, Input Output Regional dan Shift Share Analysis.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Dari analisa regional yang telah dikemukakan, analisis basis ekonomi merupakan salah satu metode yang dapat menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah melalui pengkajian sektor industri basis. Dengan pendekatan ini akan dapat diketahui aktivitas ekspor daerah, meramalkan pertumbuhan aktivitas tersebut dan mengevaluasi akibat selanjutnya dari aktivitas ekspor tambahan terhadap aktivitas bukan ekspor (Hoover, 1977). Sesuai dengan tujuan penelitian, model basis ekonomi dipakai untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang basis dan bukan basis dalam perekonomian wilayah Sumatera Barat.

## B. Kuosien Lokasi (Location Quotient)

Kuosien lokasi merupakan salah satu metode yang bisa dipakai dalam menentukan basis tidaknya suatu sektor ekonomi. Dalam konsep basis ekonomi, perekonomian disederhanakan menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor bukan basis (Bendavid, 1991).

Bendavid (1991) mengemukakan bahwa kegiatan sektor basis merupakan sektor yang mampu mengekspor barang dan jasa ke luar wilayah masyarakat yang bersangkutan. Sektor basis berperan sebagai penggerak utama dalam perekonomian wilayah, karena sektor ini mampu menciptakan permintaan terhadap faktor produksi dan pendapatan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan dampak multiplier terhadap perubahan perekonomian wilayah. Di pihak lain sektor non basis hanya mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan

oleh perekonomian wilayah.

Secara lebih rinci, Glasson (1974) mengemukakan bahwa ada dua metode untuk menentukan basis tidaknya suatu sektor ekonomi yaitu metode pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung dilakukan melalui survey secara langsung untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang basis dan bukan basis. Metode ini jarang dipakai karena membutuhkan dana dan tenaga yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Atas dasar ini para pakar ekonomi regional menyarankan penggunaan pengukuran tidak langsung.

Metode pengukuran tidak langsung terdiri: (1) metode melalui pendekatan asumsi, (2) metode kuosien lokasi, (3) metode kombinasi antara asumsi dan kuosien lokasi dan (4) metode kebutuhan minimum. Glasson (1974) selanjutnya menjelaskan bahwa pendekatan asumsi, menganggap sektor industri primer dan industri manufacturing sebagai sektor basis dan sektor jasa sebagai sektor bukan basis. Sedangkan metode kuosien lokasi, merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan atau tenaga kerja dari sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan atau tenaga kerja total wilayah dengan pangsa relatif antara pendapatan atau tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah yang lebih tinggi terhadap pendapatan atau tenaga kerja total pada tingkat wilayah yang lebih tinggi. Bendavid (1991) menformulasikan metode ini sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Xr \;/\; Xn}{RVr \;/\; RVn} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (1)$$

Keterangan:

LQ = Indeks Kuosien Lokasi

Xr = Pendapatan (nilai tambah) sektor X pada tingkat wilayah.

Xn = Total pendapatan pada tingkat wilayah.

RVr = Pendapatan sektor X pada tingkat nasional.

RVn = Total pendapatan pada tingkat nasional.

Berdasarkan persamaan (1), suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis jika indeks LQ besar dari satu dan sektor non basis jika indeks LQ kecil dari satu.

Pendekatan tidak langsung ketiga yaitu kombinasi antara metode asumsi dan kuosien lokasi. Pendekatan ini menganggap bahwa semua tenaga kerja dan pendapatan dari sektor industri primer dianggap sebagai sektor basis, dan semua tenaga kerja dan pendapatan dari sumber-sumber khusus seperti pendidikan, kelembagaan dan politik, dianggap sebagai sektor bukan basis. Sedangkan pendekatan kebutuhan minimum melibatkan penyeleksian sejumlah wilayah yang sama dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi minimum dari tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung industri regional dan bukannya industri rata-rata. Untuk setiap wilayah yang pertama-tama dihitung adalah persentase angkatan kerja yang diperkerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase itu dibandingkan dengan menghitung hal-hal yang bersifat

berlainan dan persentase terkecil dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini digunakan sebagai batas dan semua tenaga kerja di wilayah lain yang lebih tinggi dari persentase ini dianggap sebagai tenaga kerja basis. Proses ini diulangi untuk setiap industri di wilayah yang bersangkutan dalam upaya memperoleh tenaga kerja basis total.

Dari keempat metode pengukuran tidak langsung seperti diuraikan di atas, Glasson (1974) menyarankan untuk memakai metode kuosien lokasi dalam menentukan basis tidaknya suatu sektor ekonomi, karena metode ini mudah dalam penerapannya dan datanya relatif banyak tersedia sehingga tidak membutuhkan dana, waktu dan tenaga yang banyak.

## C. Pertumbuhan dan Pemerataan

Sebagian besar negara di dunia setelah perang dunia kedua banyak mengalami stagnasi ekonomi. Untuk keluar dari permasalahan ini, telah menimbulkan suatu keyakinan bagi para ekonom untuk memacu pertumbuhan sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Keyakinan ini pada akhirnya melahirkan suatu moral pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. (The Kian Wie,1981). Secara konsepsional, pertumbuhan adalah suatu proses peningkatan GNP suatu negara dari tahun ketahun dan salah satu pengukuran yang banyak dipakai untuk

keperluan ini adalah rumus bunga berbunga (Laing, 1986):

$$Yt = Yo\ (1 + g)^{t} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ (2)$$

dimana:

Yt = GNP pada tahun akhir.

Yo = GNP pada tahun awal.

g = Pertumbuhan rata-rata selama periode yang diselidiki.

t = Periode analisis.

Todaro (1978) mengemukakan bahwa selama dekade 1960-an, model pembangunan yang diterapkan sebagian sebagian besar negara di dunia adalah model pertumbuhan (growth model). Pada priode ini PBB menetapkannya sebagai dekade pembangunan dengan pertumbuhan GNP sebesar 6 % per tahun. Dasar pemikirannya adalah dengan laju pertumbuhan yang tinggi, diharapkan dapat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat melalui adanya trickle down effect (efek menetes ke bawah) dan spread effect (efek menyebar), pada akhirnya diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki pemerataan dalam proses pembangunan.

Mekanisme menetes ke bawah yang diharapkan jalan dalam proses pembangunan , ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Terbukti ada negara yang mampu mencapai target pertumbuhan seperti yang diterapkan PBB, namun di pihak lain negara termebut tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial, bahkan yang muncul melainkan gejala kemiskinan absolut, pengangguran dan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

ketimpangan pembangunan (Ul Haq, 1969). Hal ini memberikan indikasi bahwa kebijaksanaan pertumbuhan harus diikuti oleh kebijaksanaan pemerataan . Sehingga hasil pembangunan bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyat. Kebijaksanaan ini oleh Ul Haq (1969), disebutnya sebagai **strategi baru** dalam pembangunan, yang meliputi beberapa aspek yaitu: **Pertama**, tujuan pembangunan harus dapat membasmi bentuk-bentuk kemiskinan secara langsung. **Kedua**, harus ditentukan ukuran kebutuhan minimum pada periode tertentu dan perencaaan produksi harus mengacu pada perencanaan konsumsi. **Ketiga**, produksi yang lebih besar dengan pemerataan yang lebih baik harus dipakai secara bersama-sama sebagai dasar dalam menyusun pola pembangunan. **Keempat**, membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya harus dijadikan sebagai dasar dalam menyusun pola pembangunan.

Ketidak berhasilan model pertumbuhan dalam mencapai sasaran pembangunan telah merangsang para akademisi pembangunan melakukan penelitian di beberapa negara berkembang. Todaro (1978) mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simon Kuznets, Chinery dan Ahluwalia, dan Papanek. Kuznets (1955) dengan menggunakan data time series, menemukan bahwa pada tahap awal pembangunan, pada umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup tajam dalam distribusi pendapatan, dan pada tahap selanjutnya baru diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih baik. Chenery dan Ahluwalia (1963), dengan menggunakan data cross section, menemukan hasil yang sama

dengan penelitian Kuznets. Namun dia tidak menyimpulkan, pembangunan yang pesat selalu menyebabkan terjadinya kemerosotan dalam distribusi pendapatan. Hal ini menurut Chenery tergantung pada kondisi-kondisi khusus serta kebijaksanaan ekonomi khusus yang ditempuh oleh negara-negara berkembang. Lain halnya dengan penemuan Papanek (1977) memperlihatkan hasil yang tidak definitif seperti hasil penelitian Ahluwalia. Ditemukannya di Taiwan, Korea Selatan pada tahun 60-an, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh distribusi yang relatif baik. Sedangkan Brazilia, Meksiko dan Venezuela, pertumbuhan yang tinggi diikuti oleh distribusi yang relatif jelek. Sehubungan dengan hal ini The Kian Wie (1981) menyimpulkan bahwa tidak dapat dikonklusikan pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu diikuti oleh kemerosotan dalam distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan yang dikemukakan pada semua penelitian di atas, diukur dengan Gini ratio. Ukuran ini menggambarkan pemerataan pembangunan antar berbagai kelompok masyarakat dalam suatu negara dan pendapatan yang diteliti adalah pendapatan rumah tangga (Household Income). Dalam perkembangan selanjutnya dalam literatur teori Ekonomi Regional, juga dikenal konsep regional inequality atau regional disparity, seperti yang dikemukakan oleh Williamson (1965). Berbeda halnya dengan pemerataan yang diukur dengan Gini Ratio, regional inequality, melihat ketimpangan pembangunan antar daer

976/HD/96-p1(2) 338.9 ZUL p.1



ah/wilayah. Berarti data yang dipakai bukan household income tapi regional income. Sebagai ukuran ketimpangan lazim dipakai Williamson Index dan indeks ini dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965. Formulanya adalah sebagai berikut:

$$Vw = \frac{\sqrt{\frac{\Sigma (Yi - Yb)^2 . fi}{n}}}{Yb} \qquad \ldots\ldots\ldots (3)$$

dimana:

Vw = Williamson indeks.

Yi = Pendapatan per kapita di region i

Yb = Pendapatan per kapita pada seluruh region.

fi = Penduduk di region i

n = penduduk di seluruh region.

Nilai Vw berkisar antara 0 - 1. Jika Vw mendekati 0. menunjukkan pembangunan yang merata antar wilayah. Sedangkan jika Vw mendekati 1 menunjukkan pembangunan yang timpang antar wilayah. Formula yang dikemukakan oleh Williamson, dilatarbelakangi oleh proposisi teori pertumbuhan **Neo Classic** yang menyatakan bahwa pada awal proses pembangunan, ketimpangan antar wilayah akan cenderung meningkat. Akan tetapi setelah pembangunan berjalan terus dan negara tersebut sudah berada pada tingkat yang lebih maju, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah secara bertahap akan mulai menurun (Borts, 1960). Proposisi tersebut dapat dilihat gambar berikut

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

ini

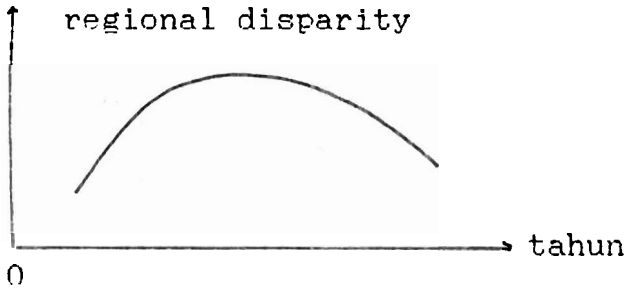


Williamson (1965) menguji proposisi **Neo Classic** di atas dengan meneliti beberapa negara di dunia dan mengelompokkan negara atas tujuh kelompok, mulai dari negara yang sangat maju sampai dengan negara yang sangat terbelakang. Dengan menggunakan data **cross section** ternyata tidak terbukti proposisi Neo Classic. Hal ini dijelaskan oleh Williamson bahwa tidak terbuktinya proposisi tersebut karena digabungkan beberapa negara yang ukuran negaranya berbeda-beda dan ini akan mempengaruhi nilai Vw.

Williamson (1965) melanjutkan penelitiannya dengan menggunakan data **time series** dari tahun 1840 - 1960 dengan kasus negara Amerika Serikat. Hasil temuannya membuktikan proposisi **Neo Classic**, bahwa tendensinya memang seperti yang digambarkan pada gambar (1) di atas. Dengan memakai model yang sama, studi ini juga bertujuan untuk mempelajari ketimpangan pembangunan antar wilayah di propinsi Sumatera Barat selama 20 tahun. Apakah proposisi Neo Classic tersebut juga berlaku untuk perekonomian Sumatera Barat.

Aspek lain yang perlu dilihat di samping pemerataan

pembangunan antar wilayah adalah struktur pertumbuhan antar wialayah dalam suatu wilayah pembangunan. Syafrizal (1990) mengemukakan bahwa analisis yang bisa dipakai untuk melihat gambaran tentang struktur pertumbuhan wilayah adalah Klassen Typology. Melalui analisa ini diperoleh 4 klasifikasi daerah/wilayah yang masing-masingnya mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu sebagai berikut:

(1). Daerah bertumbuh cepat (Rapid Growth Region).

(2). Daerah tertekan (Retarded Region).

(3). Daerah sedang bertumbuh (Growing Region).

(4). Daerah terbelakang (Under Developing Region).

Daerah bertumbuh cepat merupakan daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang rata-rata lebih tinggi dari rata-rata keseluruhan daerah. Pada dasarnya daerah yang termasuk klasifikasi ini merupakan daerah yang paling maju baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Daerah ini mempunyai potensi pembangunan yang besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan daerah maju tapi tertekan merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk berkembang akan tetapi potensi tersebut belum banyak diusahakan. Karakteristik daerah ini, laju pertumbuhannya di atas pertumbuhan rata-rata seluruh daerah tetapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dari pedapatan per kapita seluruh daerah.

Daerah berkembang merupakan daerah yang potensi pengembangan yang dimilikinya sangat besar, tapi belum diolah sepenuhnya secara baik. Daerah ini pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata seluruh daerah tetapi pendapatan per kapita daerah ini lebih tinggi dari pendapatan per kapita seluruh daerah. Daerah terbelakang merupakan daerah yang potensi pembangunannya relatif lebih kecil, sehingga pertumbuhan dan pendapatan per kapita daerah ini lebih rendah dari pertumbuhan dan pendapatan per kapita seluruh daerah. Keempat klasifikasi di atas karakteristiknya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Karakteristik Pertumbuhan Wilayah Berdasarkan Klassen Typologi

| r y | $\bar{Y}i > y$ | $\bar{Y}i < y$ |
|---|---|---|
| $\bar{r}i > r$ | Daerah maju dan tumbuh cepat. | daerah berkembang cepat. |
| $\bar{r}i < r$ | Daerah maju tetapi tertekan. | daerah kurang berkembang. |

$\bar{r}i$ = Laju pertumbuhan PDRB di region i.

r = Laju pertumbuhan PDRB rata-rata seluruh region.

$\bar{Y}j$ = Pendapatan per kapita di region i.

y = pendapatan per kapita rata-rata seluruh region.

Di samping aspek pertumbuhan dan pemerataan, aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pembangunan dalam bidang sosial. Tidak jarang pembangunan dan pertumbuhan yang tinggi tidak diikuti oleh pembangunan di bidang sosial. Dalam pengukurannya tentu

digunakan ukuran-ukuran praktis dalam bentuk indikator sosial. Syafrizal (1990) memakai indikator Indeks Kualitas Fisik Kehidupan (Physical Quality of Life Index) dan persentase penduduk umur 7 - 12 tahun yang memasuki sekolah. Indeks Kualitas Fisik Kehidupan merupakan gabungan dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang merupakan indikator tingkat kesehatan masyarakat. Sedangkan persentase penduduk usia 7 - 12 yang memasuki sekolah adalah merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat daerah yang bersangkutan.

D. Kerangka Pemikiran

Perencanaan dan program pembangunan di Indonesia dan begitu juga halnya untuk setiap daerah tingkat I dan II. pelaksanaannya berpijak pada trilogi pembangunan yang terdiri dari unsur pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Dari ketiga unsur trilogi tersebut, unsur pemerataan lebih ditonjolkan terutama sekali sejak Pelita III. Namun kenyataannya pendekatan pembangunan Indonesia masih dapat dikatakan berorientasi pada pertumbuhan. Hal ini terbukti dari target laju pertumbuhan ekonomi selama Pelita V rata-rata 5 % per tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, sektor ekonomi yang berproduktivitas tinggi mendapat prioritas utama dalam pembangunannya, dan hal ini cenderung berlokasi pada daerah-daerah yang relatif lebih baik sarana dan prasarana fisiknya. Artinya aktivitas pembangunan cenderung terkonsentrasi pada daerah-daerah yang memiliki <u>localiza-</u>

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

tion economies dan urbanization economies.

Arah dan strategi pembangunan yang berorentasi untuk memacu pertumbuhan, hanya bisa mencapai satu sisi pembangunan yaitu sisi pertumbuhan. Namun mungkin saja sisi pembangunan lain kurang tercapai seperti distribusi manfaat pembangunan. Aspek ini tentulah sangat penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu perlu perhatian khusus pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lapisan terbawah, sehingga kepincangan antar golongan dapat dikurangi. Tidak jarang terjadi proyek pembangunan hanya memberikan manfaat kepada kalangan masyarakat kuat yang berada di luar proyek. Di pihak lain golongan masyarakat lemah yang berada di sekitar proyek tetap hidup miskin, karena mereka tidak dapat mengambil manfaat yang ditimbulkan oleh proyek.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga merupakan aspek penting lainnya yang harus mendapat perhatian khusus, karena upaya peningkatan laju pertumbuhan, mungkin saja dibayar dengan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan kemunduran dalam pembangunan di bidang sosial. Berdasarkan kerangka pemikiran ini, dalam studi ini ditetapkan aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah, karakteristik pertumbuhan setiap wilayah, pembangunan sosial dan sektor ekonomi yang dominan pada setiap wilayah, sebagai aspek yang akan ditelusuri sehingga tergambar profil pembangunan wilayah propinsi Sumatera Barat selama periode analisis.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Data Penelitian dan Pengukurannya

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, data penelitian meliputi:

a. Total pendapatan wilayah pada tingkat nasional. propinsi Sumatera Barat dan per daerah tingkat II di Sumatera Barat. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan indikator pendapatan, yaitu nilai tambah pada masing-masing sektor.

b. Jumlah penduduk Indonesia dan propinsi Sumatera Barat dari 1970 sampai 1990.

c. Income per kapita Indonesi dan propinsi Sumatera Barat dari tahun 1970 sampai 1990.

d. Laju pertumbuhan PDRB setiap wilayah tingkat II di propinsi Sumatera Barat dan laju pertumbuhan PDRB rata-rata propinsi Sumatera Barat pada tahun 1990.

e. Indeks PQLI (Physical Quality of Life Index) propinsi Sumatera Barat dan jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang memasuki jenjang pendidikan dasar.

## B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk keperluan analisa dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut. dikumpulkan melalui observasi dokumentasi pada kantor BPS propinsi Sumatera Barat dan instansi lain yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

## C. Model Analisa

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan, maka dalam pelaksanaan penelitian digunakan beberapa model analisa yaitu sebagai berikut:.

a. Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan wilayah propinsi Sumatera Barat dari tahun 1970 sampai 1990, maka dipakai Williamson Index. Bentuk operasional dari Indeks ini adalah: persamaan (3) halaman 16.

$$VW = \frac{\sqrt{(Yj - Yb)^2 . fi/n}}{Yb} \quad ....(3)$$

Keterangan:

Vw = Indeks ketimpangan pembangunan wilayah Sumatera Barat.

Yi = Pendapatan regional per kapita Sumatera Barat.

Yb = Pendapatan per kapita Indonesia

fi = Jumlah penduduk Sumatera Barat.

n = Jumlah penduduk Indonesia

b. Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan per wilayah tingkat II di propinsi Sumatera Barat, digunakan Klassen Typologi, seperti yang telah dideskripsikan pada Tabel (1) halaman 18.

c. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang tergolong basis dan bukan basis dalam perekonomian propinsi Sumatera Barat dan per wilayah tingkat II, digunakan indeks Kuosien Lokasi (Location Quotient). Bentuk operasional dari Indeks ini adalah :

$$LQ = \frac{Xr/Xn}{RVr/RVn} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (4)$$

Keterangan:

LQ = Indeks Kuosien Lokasi sektor-sektor ekonomi di Sumatera Barat.

Xr = Nilai tambah sektor X di Sumatera Barat

Xn = Total pendapatan wilayah Sumatera Barat.

RVr = Nilai tambah sektor X di Indonesia

RVn = Total pendapatan wilayah Indonesia

d. Untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan dalam bidang sosial, maka dideskripsikan secara kualitatif indikator pembangunan sosial dengan pendapatan per kapita propinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Tabel sesuai dengan keperluan analisa.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Umum Wilayah Studi

### 1. Kondisi Geografis

Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia bahagian Barat dengan luas 42.297,30 $Km^2$ atau 1,59 % dari luas wilayah Indonesia. Secara astronomis daerah ini terletak antara $0^{o}54'$ LU sampai $3^{o}$ 30' LS dan $98^{o}$ 36' BT sampai $101^{o}$ 33' BB. Batas administrasi daerah ini adalah sebelah utara dengan propinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan propinsi Bengkulu dan Jambi, sebelah Barat dengan Samudera Indonesia dan sebelah Timur dengan propinsi Riau.

Sumatera Barat merupakan daerah yang dilalui bukit barisan. Akibatnya sebahagian besar daerah ini terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi. Kondisi ini pada akhirnya akan mempengaruhi pemanfaatan lahan yang tersedia, 28,50 % dari luas daerah ini merupakan kawasan hutan lindung. Disamping itu 41,5 % dari luas Sumatera Barat berada pada wilayah curam dengan kemiringan lebih dari 40 %. Daerah ini sudah dapat diolah baik untuk pertanian maupun pemukiman penduduk. Hal ini berarti bahwa hanya sekitar 58,5 % dari luas daerah ini yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi dan pemukiman penduduk. Kondisi alamiah yang demikian jelas akan mempengaruhi kapasitas produksi daerah dalam menghasilkan berbagai macam komoditi yang dibutuhkan masyarakat.

2. Sumberdaya Lahan

Sumberdaya lahan merupakan faktor penentu yang relatif penting terhadap kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan berbagai macam komoditi pertanian. Daerah-daerah dengan sumberdaya lahan yang relatif baik. cenderung mampu menghasilkan komoditi pertanian yang banyak dan berfungsi sebagai pemasok bagi daerah lain terhadap komoditi tersebut.

Sumatera Barat dengan kondisi geografis seperti dikemukakan di atas, didominasi oleh tanah mineral dengan ordo ultisol dan inciptisol. Berdasarkan jenis tanah ini diteliti lagi mengenai kemampuan lahan/tanah tersebut untuk dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Istilah teknis untuk ini adalah kelas kesesuaian lahan. Sehubungan dengan hal ini Lembaga Penelitian Tanah di Bogor membagi kelas kesesuaian lahan atas 8 kelas. Semakin tinggi kelas kesesuaian lahan semakin rendah kemampuan dan penggunaannya.

Bertitik tolak dari pembahagian kelas kesesuaian lahan di atas. lahan di Sumatera Barat termasuk kelas ketiga sampai dengan kelas kedelapan. Hanya 31,51 % dari luas Sumatera Barat yang termasuk kategori kelas ketiga sampai keempat dan sebanyak 68,49 % terdiri dari lahan dengan kelas keempat sampai kedelapan. Berarti relatif kecil lahan yang tersedia untuk aktivitas pertanian dengan kelas kesesuaian lahan yang relatif baik. Kondisi ini pada akhirnya jelas akan berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

pertanian dan sektor-sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pertanian.

3. Sumberdaya Manusia.

Sumberdaya manusia merupakan sektor yang aktif dan dominan pengaruhnya dalam percepatan proses pembangunan. Dalam dekade sekarang ini semakin dirasakan perlunya upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hanya dengan kualitas sumberdaya manusia yang memadai pembangunan suatu wilayah dapat mengalami transformasi dari struktur yang bercorak agraris ke struktur yang bercorak industri. Hal ini berarti bahwa jumlah sumberdaya manusia yang relatif banyak tanpa diikuti oleh kualitas yang relatif baik cenderung sebagai beban pembangunan bukan faktor pendorong pembangunan.

Dari segi kuantitas, berdasarkan sensus penduduk 1980 penduduk Sumatera Barat berjumlah 3.406.132 orang. sedangkan hasil sensus penduduk tahun 1990 berjumlah 3.999.764 orang. Berarti terjadi pertumbuhan sebesar 1.62 %. Pada tahun 1990, 61 % dari penduduk Sumatera Barat adalah tergolong generasi muda dan ini merupakan suatu kondisi yang positif jika kemampuan ekonomi daerah memadai untuk menyerap penduduk yang relatif produktif tersebut.

Dilihat dari segi kualitas, salah satu proksinya adalah pendidikan. Berdasarkan hasil survey penduduk antar sensus tahun 1985, ditemukan bahwa penduduk yang

berumur 10 tahun ke atas sebanyak 2.641.004 jiwa. Dari jumlah tersebut, 258.755 jiwa tidak pernah sekolah. 1.135.292 jiwa tidak tamat SD. 706.643 jiwa tamat SD, dan hanya 9.842 orang tamat akademi, dan 9.369 orang tamat perguruan tinggi. Data ini menunjukan bahwa kualitas sumberdaya manusia di Sumatera Barat masih memprihatinkan. Kondisi ini menuntut upaya pemerintah yang ekstra keras untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Barat dalam rangka mempercepat dan memperkuat proses dan basis perekonomian Sumatera Barat pada masa yang akan datang.

Aspek lain dari sumberdaya manusia adalah angkatan kerja. Data yang dilaporkan BPS propinsi Sumatera Barat tahun 1991, menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat sebanyak 1.559.985 orang. Sebanyak 2 % dari jumlah tersebut masih mencari pekerjaan, berarti sebanyak 8,8 % sudah mendapat pekerjaan. Dilihat dari komposisi umur, di perkotaan angkatan kerja terbanyak berusia 20- 24 tahun, sedangkan di pedesaan berusia 15 - 19 tahun. Berarti angkatan kerja lebih banyak di pedesaan dari pada di perkotaan. Data ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan aktivitas ekonomi pedesaan sangat perlu dilakukan dalam rangka menampung angkatan kerja yang tersedia. Artinya mengandalkan sektor pertanian sebagai satu-satunya sektor ekonomi untuk menampung angkatan kerja pedesaan sangat mengkuatirkan. Justru itu perlu diupayakan pengembangan sektor ekonomi non pertanian seper-

ti pengembangan industri skala menengah dan kecil yang ada hubungan input outputnya dengan sektur pertanian.

Pada saat ini, sektor pertanian masih memberikan konstribusi relatif besar dalam penangulangan tenaga kerja, yaitu lebih kurang 61 %. Sedangkan sektor industri hanya 9.35 %. Untuk masa yang akan datang kondisi yang diharapkan adalah peningkatan konstribusi sektor industri dalam menyerap angkatan kerja yang relatif besar. Kebijaksanaan yang relevan untuk ini adalah pengembangan industri skala kecil dan menengah di pedesaan.

## B. Profil Pembangunan Wilayah

Sesuai dengan tujuan studi ini yaitu untuk melihat profil pembangunan wilayah propinsi Sumatera Barat. Aspek utama yang dibahas dalam studi ini adalah pertumbuhan ekonomi dan struktur pertumbuhan wilayah, sektor-sektor ekonomi yang basis dalam pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan wilayah dan kondisi sosial. Semua aspek ini menurut Syafrizal (1990) merupakan indikator utama dalam melihat profil pembangunan suatu wilayah.

### 1. Struktur Pertumbuhan Wilayah

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah tersebut. Metode pengukurannya terdiri dari pertumbuhan rata-rata tahunan. Pertumbuhan tahunan dihitung dengan cara PDRB pada tahun tertentu kurang PDRB pada tahun sebelumnya dibagi dengan PDRB

pada tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan rata-rata tahunan dihitung dengan formula yang telah dirumuskan pada persamaan (2) halaman 14.

Berdasarkan laporan BPS Sumatera Barat (1990) ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. artinya selalu terjadi percepatan proses pembangunan ekonomi di wilayah ini. Selama Pelita IV, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat rata-rata 5,79 %. Angka pertumbuhan ini meningkat relatif tajam menjadi 7,06 % pada tahun kedua Pelita V. Angka ini jauh berada di atas angka yang ditargetkan yaitu 5,5 %.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada periode tersebut di atas, tidak terlepas dari tingginya laju pertumbuhan sektor - sektor ekonomi di wilayah ini. Angka pertumbuhan masing-masing ekonomi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2. ternyata pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Sumatera Barat selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Tidak satupun dari sektor ekonomi yang mempunyai tendensi yang selalu menaik. Hal ini secara ekonomi merupakan suatu kewajaran, karena produksi yang dihasilkan oleh masing-masing sektor sangat sensitif terhadap perubahan harga, kapasitas produksi atau oleh kondisi ekonomi yang semakin global (era globalisasi ekonomi).

Tabel 2: Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Barat Menurut Sektor Selama Pelita II, III, IV dan Dua Tahun Pertama Pelita V

| No. | Sektor Ekonomi | Pelita II (%) | Pelita III (%) | Pelita IV (%) | Dua Thn I Pelita V/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian | 2,8 | 4,5 | 5,68 | 5,03 |
| 2. | Pertambangan | 0,5 | 32,7 | 5,53 | 10,50 |
| 3. | Industri | 12,7 | 12,5 | 5,66 | 15,89 |
| 4. | Bangunan | 2,7 | 1,0 | 5,00 | 7,43 |
| 5. | Listrik dan Air Minum | 14,8 | 14,8 | 4,95 | 6,87 |
| 6. | Angkutan dan Komunikasi | 13,4 | 11,3 | 5,51 | 3,10 |
| 7. | Perdagangan | 12,6 | 6,8 | 5,31 | 8,37 |
| 8. | Bank dan Lembaga Keuangan | 14,0 | 16,1 | 8,73 | 7,48 |
| 9. | Sewa Rumah | 2,2 | 1,6 | 2,72 | 3,25 |
| 10. | Pemerintahan dan Pertahanan | 8,8 | 4,8 | 3,71 | 6,63 |
| 11. | Jasa | 5,8 | 6,8 | 4,75 | 7,14 |

Sumber: Kantor Statistik Cabang Sumatera Barat

Oleh karena itu sangat diperlukan daya antisipasi yang tinggi dan tajam bagi pengambil keputusan dalam masing-masing sektor ekonomi tersebut. Artinya sumber-daya manusia yang diberi tugas oleh pemerintah harus punya visi yang jauh ke depan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang secara langsung berpengaruh terhadap eksistensi sektor ekonomi yang dikelolahnya. Dengan kata lain pengambil keputusan tersebut harus berkualifikasi sebagai perencana yang punya kemam-puan dalam mengidentifikasi aspek tata ruang wilayah.

Bila ditelusuri lebih jauh data yang terdapat dalam Tabel 2 , ada tiga sektor ekonomi yang perlu diperhatikan perkembangannya yaitu sektor pertanian, industri dan sektor jasa. Ketiga sektor ini dapat menggambarkan proses transformasi ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah pembangunan.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Sektor pertanian selama Pelita II, mengalami pertumbuhan yang relatif rendah yaitu 2,8 % per tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum begitu pulih akibat berbagai penyakit ekonomi yang dialami selama Pelita I dan begitu juga halnya dengan kondisi politik. Namun pada Pelita II dan IV, laju pertumbuhan sektor pertanian meningkat dari 4,5 % menjadi 5,68 %. Peningkatan ini barangkali ada kaitan nya dengan berbagai macam paket teknologi yang diin trodusir oleh pemerintah selama periode tersebut, seperti Insus dan Supra Insus. Peningkatan yang terja di pada Pelita IV, pada dua tahun pertama Pelita V, pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan menjadi 5,03 %. Penurunan pertumbuhan sektor pertanian pada dua tahun pertama Pelita V, merupakan kondisi yang diinginkan dalam rangka menuju proses transformasi ekonomi. Kondisi yang demikian harus didukung oleh peningkatan laju pertumbuhan sektor industri yang cukup memadai. Tetapi data pada Tabel 2 di atas menunjukkan laju pertumbuhan sektor industri yang selalu menurun selama Pelita II, III dan IV. Baru pada dua tahun pertama Pelita V pertumbuhan sektor industri meningkat secara tajam menjadi 15,89 %. Peningkatan yang relatif besar ini, dikonstribusi oleh tingginya pertumbuhan sub sektor industri besar dan sedang yaitu sebesar 28,63 %. Kemudian diikuti oleh sub sektor industri kecil dan rumah tangga sebesar 9,31 % (BPS, Sumatera Barat, 1990).

Pertumbuhan sektor industri ini pada masa mendatang harus ditingkatkan agar terjadi proses transformasi ekonomi dari bercorak agraris ke industri. Artinya para pengambil kebijaksanaan harus mampu merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang konkrit dan operasional dalam rangka memacu pertumbuhan sektor industri. Sektor industri yang dipacu pertumbuhannya bukan hanya difokuskan pada industri besar dan sedang, tetapi juga pertumbuhan industri skala kecil. Sub sektor industri yang disebutkan terakhir inilah yang memberikan konstribusi yang relatif besar dalam mengabsorbsi angkatan kerja. terutama sekali angkatan kerja di pedesaan. Dari 126.789 orang angkatan kerja yang diserap oleh sektor industri, sebanyak 111.060 orang diserap oleh industri skala kecil. Namun kontribusi sub sektor industri skala kecil terhadap pertumbuhan nilai tambah sektor industri jauh relatif kecil dibandingkan dengan industri besar dan sedang (BPS Sumatera Barat, 1990). Data ini menunjukkan adanya kepincangan dalam sub sektor industri skala kecil tersebut.

Sektor jasa dalam struktur perekonomian Sumatera Barat, pertumbuhannya juga menunjukkan fluktuasi dari Pelita II, III dan IV. Dari Pelita II ke Pelita III terjadi peningkatan pertumbuhan, namun dari Pelita III ke Pelita IV terjadi penurunan pertumbuhan. Tetapi jika diperhatikan pertumbuhan dari Pelita IV ke Pelita V dalam dua tahun pertama terjadi peningkatan yang

relatif besar.

Bila yang diamati periode data dari Pelita IV ke Pelita V dalam dua tahun pertama, dapat dikatakan bahwa telah terjadi proses transformasi dalam perekonomian Sumatera Barat. Karena selama periode tersebut telah terjadi penurunan pertumbuhan sektor pertanian yang diikuti oleh peningkatan pertumbuhan sektor industri dan jasa.

Kesimpulan yang dikemukakan dari data pada Tabel 2. harus dilengkapi dengan data kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat. Data ini disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3: Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Tahun 1984, 1988 dan 1992

| No. | Sektor Ekonomi | 1984 | 1988 | 1992 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian | 33,73 | 34,81 | 29,73 |
| 2. | Pertambangan | 0,75 | 1,20 | 1,51 |
| 3. | Industri | 15,73 | 10,32 | 13,10 |
| 4. | Bangunan | 5,50 | 3,87 | 3,76 |
| 5. | Listrik dan Air Minum | 0,39 | 1,62 | 1,76 |
| 6. | Angkutan dan Komunikasi | 10,24 | 8,76 | 10,03 |
| 7. | Perdagangan | 23,86 | 23,01 | 24,16 |
| 8. | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 1,35 | 2,19 | 2,75 |
| 9. | Sewa Rumah | 2,06 | 2,57 | 1,99 |
| 10. | Pemerintahan dan Pertahanan | 7,95 | 8,54 | 9,09 |
| 11. | Jasa | 2,04 | 3,06 | 2,74 |

Sumber: Kantor Statistik Sumatera Barat Beberapa Terbitan

Berdasarkan konsep transformasi ekonomi, transformasi tercermin dari relatif besarnya kontribusi sektor industri terhadap pembentukan pendapatan wilayah. Sedangkan sektor pertanian konstribusinya semakin

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

bahwa dalam struktur perekonomian wilayah Sumatera Barat terjadi kondisi yang sebaliknya jika diperhatikan periode analisa tahun 1984 dan 1988. Dalam hal ini terjadi peningkatan kontribusi sektor pertanian, tetapi diikuti oleh penurunan kontribusi sektor industri. Namun dalam periode 1988 dan 1992, terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian dan diikuti oleh peningkatan kontribusi sektor industri. Pada periode tersebut dapat dikatakan telah terjadi proses transformasi ekonomi.

Bertitik tolak dari data pada Tabel 1 dan Tabel 3, memberikan indikasi bahwa proses transformasi dalam perekonomian Sumatera Barat belum begitu mantap, artinya belum ditemukan suatu proses transformasi dengan pola yang jelas (selalu berubah). Kondisi ini memberikan implikasi kebijaksanaan bahwa sangat diperlukan suatu upaya untuk merangsang pertumbuhan sektor industri di Sumatera Barat pada masa mendatang. Untuk keperluan itu perlu dilakukan suatu studi khusus dalam rangka merumuskan kebijaksanaan yang konkrit dan operasional. Dengan studi tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor industri yang relevan dikembangkan.sesuai dengan aspek tata ruang wilayah ini. Bila data tentang pertumbuhan seperti yang dikemukakan pada Tabel 2 digabung secara sistematis dengan tingkat struktur pertumbuhan wilayah Sumatera Barat. Gambaran ini dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek pembangunan wilayah pada masa mendatang. Pada sisi

lain hal ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan pembangunan wilayah.

Dalam menganalisa struktur pertumbuhan wilayah, harus dilihat dan dibandingkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita pada sub wilayah. Sub wilayah yang dimaksudkan adalah wilayah-wilayah yang ada pada wilayah tertentu. Dalam studi ini yang dipelajari adalah struktur pertumbuhan wilayah Sumatera Barat, maka sub wilayahnya adalah daerah-daerah tingkat II yang ada di Sumatera Barat. Data mengenai pertumbuhan dan pendapatan per kapita pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4. selama periode analisa ternyata setiap daerah tingkat II mencapai laju pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang relatif berbeda. Kondisi yang demikian mungkin disebabkan oleh potensi alamiah dan insaniah yang berbeda pada setiap daerah. Daerah tingkat II yang laju pertumbuhannya rata-rata di atas 5 % per tahun adalah kodya Padang, Sawahlunto, kodya Solok, kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Padang Pariaman dan Pasaman. Sedangkan pendapatan yang tertinggi dicapai oleh kodya Padang, Bukittinggi dan Sawahlunto. Wilayah kotamadya pertumbuhan pembangunannya relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan wilayah kotamadya sebagai pusat kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Tabel 4. Pertumbuhan dan Pendapatan Per kapita Per Daerah Tingkat II di Sumatera Barat Tahun 1988 - 1992.

| Nama Daerah Tingkat II | Pertumbuhan (%.) | Pendapatan Per Kapita (Rp.) |
|---|---|---|
| A. Kabupaten | | |
| 1. Pesisir Selatan | 4,6 | 320.580 |
| 2. Solok | 3,4 | 307.025 |
| 3. Sawahlunto/Sijunjung | 6,0 | 368.218 |
| 4. Tanah Datar | 4,0 | 346.266 |
| 5. Padag Pariaman | 5,8 | 325.018 |
| 6. Agam | 3,8 | 317.548 |
| 7. 50 Kota | 4,9 | 407.870 |
| 8. Pasaman | 5,9 | 330.005 |
| B. Kodya | | |
| 1. Padang | 8,8 | 761.871 |
| 2. Solok | 6,8 | 621.205 |
| 3. Sawahlunto | 8,0 | 735.891 |
| 4. Padang Panjang | 5,6 | 560.727 |
| 5. Bukittinggi | 3,7 | 621.205 |
| 6. Payakumbuh | 5,5 | 440.800 |
| Rata-rata | 5,48 | 417.358 |

Sumber: Kantor Statistik Cabang Sumatera Barat

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat struktur pertumbuhan wilayah dengan menggunakan Klassen Typologi. Berdasarkan analisa ini, diperoleh 4 klasifikasi daerah tingkat II di Sumatera Barat yang masing-masingnya memiliki karakteristik yang berbeda. Keempat klasifikasi daerah tersebut disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5, ditemukan bahwa 5 dari 6 daerah kotamadya di Sumatera Barat termasuk klasifikasi daerah maju dan tumbuh cepat. Berarti sebahagian besar dari potensi pembangunan yang dimiliki daerah tersebut telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Diperkirakan daerah ini akan terus berkembang pada masa mendatang.

Tabel 5. Klasifikasi Daerah Tingkat II di Wilayah Sumatera Barat Menurut Klassen Typology Tahun 1988 - 1992

| $r$ | $\bar{Y}_i > Y$ | $\bar{Y}_i < Y$ |
|---|---|---|
| $\bar{r}_i > r$ | I. Daerah Maju dan Maju Cepat<br>1. Kodya Padang<br>2. Kodya Solok<br>3. Kodya Padang Panjang<br>4. Kodya Sawahlunto<br>5. Kodya Payakumbuh | II. Daerah Berkembang Cepat<br>1. Kab.Sawahlunto/ Sijunjung<br>2. Kab.Padang Pariaman<br>3. Kab.Pasaman |
| $\bar{r}_i < r$ | III. Daerah Maju Tetapi Tertahan<br>1. Kodya Bukittinggi | IV. Daerah Kurang Berkembang<br>1. Kab.Pesisir Selatan<br>2. Kab.Solok<br>3. Kab.Tanah Datar<br>4. Kab.Agam<br>5. Kab. 50 Kota |

Keterangan:
$\bar{r}_i$ = pertumbuhan Produk Domestik Bruto wilayah i
$r$ = pertumbuhan Produk Domestik Bruto rata-rata
$\bar{Y}_i$ = pendapatan Per Kapita di wilayah i
$Y$ = pendapatan Per Kapita rata-rata seluruh wilayah.

Sebaliknya 63 % dari daerah kabupaten di Sumatera Barat termasuk klasifikasi daerah kurang berkembang. Daerah ini mempunyai laju pertumbuhan yang rendah. sekaligus pendapatan perkapita yang juga relatif rendah. Sisanya termasuk kabupaten dengan klasifikasi daerah berkembang cepat yaitu kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung, Padang Pariaman dan kabupaten Pasaman. Artinya daerah tersebur mempunyai potensi pembangunan yang relatif besar. tetapi belum seluruhnya diolah secara baik, sehingga walaupun laju pertumbuhannya relatif tinggi. namun tingkat pendapatan per kapita daerah ini relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya di Sumatera Barat. Oleh

karena itu daerah daerah tersebut diperkirakan pada masa mendatang akan terus berkembang dengan pesat dalam mengejar ketinggalannya dari daerah lain.

Kotamadya Bukittinggi merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang termasuk daerah maju, tetapi tertekan. Secara teoritis berarti daerah Bukittinggi termasuk maju. Akan tetapi karena berbagai tekanan yang terjadi terhadap sektor-sektor utama pada daerah ini, kemajuannya menjadi tertahan. Artinya walaupun daerah Bukittinggi termasuk klasifikasi maju, pada masa mendatang diperkirakan pertumubuhani pembangunannya tidak begitu cepat walaupun potensi pembangunannya relatif besar. Dugaan dan perkiraan tersebut relevan dengan kondisi yang di alami kotamdaya Bukittingi pada tahun-tahun terakhir. Dalam tahun-tahun sebelumnya kodya Bukittinggi merupakan daerah perlintasan perdagangan antar kota seperti Medan, Pekan Baru dan Jakarta. Arus perdagangan ini melalui kota Bukittinggi. Tetapi dengan dibukanya jalan lintas antara Medan dengan Pekan Baru, arus perdagangan tersebut tidak lagi melalui kotamadya Bukittinggi lagi, barangkali hal ini akan dapat mempengaruhi aktivitas pembangunan di kodya Bukittinggi, artinya kondisi tersebut yang memungkinkan tertekannya pertumbuhan ekonomi kotamadya Bukittinggi.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

## 2. Analisa Potensi Pembangunan Wilayah Sumatera Barat

Secara teoritis cukup banyak model yang bisa dipakai dalam menganalisa potensi pembangunan suatu wilayah seperti analisa input-output, multiplier regional, basis ekonomi dan analisa keunggulan komparatif. Masing-masing analisa tersebut memiliki kompleksitas data yang berbeda. Namun analisa basis ekonomi merupakan salah satu analisa yang secara sederhana dapat dipakai untuk melihat potensi pembangunan wilayah. Dalam aplikasinya, analisa tersebut menggunakan indeks Kuosien Lokasi. Indeks ini telah diformulasikan pada persamaan (1) halaman sebelumnya. Berdasarkan indeks tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan suatu sektor ekonomi merupakan potensi pembangunan yang cukup berarti dan layak untuk dikembangkan, apabila nilai indeksnya lebih besar dari satu (LQ > 1). Sebaliknya jika nilai indeks yang diperoleh kecil dari satu (LQ < 1), berarti sektor ekonomi tersebut bukan merupakan potensi pembangunan yang berarti dan kurang layak untuk dikembangkan. Dengan menggunakan data PDRB Sumatera Barat, nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi pada tingkat Sumatera Barat dan tingkat Nasional, indeks kuosien lokasi dapat ditentukan nilainya seperti disajikan pada Tabel 6 .

Berdasarkan data pada Tabel 6, ditemukan bahwa ada 4 sektor ekonomi yang merupakan potensi pembangunan yang cukup berarti dan secara ekonomi layak untuk

dikembangkan pada masa yang akan datang. Kelompok sektor ekonomi tersebut adalah sektor pertanian.

Tabel 6: Indeks LQ Sektor-Sektor Ekonomi Di Sumatera Barat Tahun 1988-1992.

| No. | Sektor Ekonomi | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian | 1.99 | 1.45 | 1.47 | 1.59 | 1.61 | 1.52 |
| 2. | Pertambangan | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
| 3. | Industri | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.72 | 0.61 |
| 4. | Listrik, Gas, Air Minum dan Bangunan | 0,93 | 0,90 | 0,81 | 0,83 | 0,93 | 0,88 |
| 5. | Angkutan dan Komunikasi | 1,12 | 1,15 | 1,04 | 1,92 | 1,98 | 1,44 |
| 6. | Perdagangan | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.60 | 1.47 |
| 7. | Bank dan Lembaga keuangan Lainnya | 0,60 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 0,67 |
| 8. | Pemerintah dan Jasa | 1,12 | 1,07 | 1,08 | 1,17 | 1,13 | 1,11 |

Sumber: Diolah dari Data PDRB Sumatera Barat Beberapa Terbitan

Perdagangan. Hotel dan Restoran. Angkutan dan Komunikasi serta Pemerintahan dan Jasa.

Berdasarkan konsep Economic Base, ke empat sektor ekonomi itu diklasifikasikan sebagai sektor basis. Sektor basis dalam struktur perekonomian suatu wilayah mempunyai kemampuan yang lebih besar dari pada Indonesia secara keseluruhan. Artinya sektor pertanian, perdagangan, angkutan dan pemerintahan/jasa mampu menghasilkan barang dan jasa bukan hanya mampu untuk kebutuhan lokal, tetapi mampu untuk mensuply kebutuhan daerah lainnya. Dengan demikian keempat sektor ini dalam proses pembangunan wilayah Sumatera Barat akan mampu berperan sebagai penggerak utama (leading sector) pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Oleh karena

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

itu keempat sektor inilah yang harus diprioritaskan pengembangannya pada masa yang akan datang. Penelitian lanjutan mengenai hal ini sangat perlu dilakukan dalam rangka merumuskan kebijaksanaan yang kongkrit dan operasional untuk keperluan tersebut.

Penemuan ini memberikan indikasi bahwa setiap daerah tingkat I di Indonesia tidak harus selalu memaksakan diri terhadap kebijaksanaan pemerintahan pusat dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah masing-masing. Artinya pengembang-an sektor ekonomi itu harus disesuaikan dengan potensi wilayah. Setiap pemerintah daerah melalui Rencana Pembangunan Lima Tahunnya masing-masing harus mempunyai data dan informasi serta punya kemampuan untuk mengidentifikasi potensi dan prioritas pembangunan untuk masing-masing daerah. Implikasi penemuan ini adalah kebijaksanaan pembangunan nasional yang bersifat sektoral sangat perlu diselaraskan dengan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada pada masing-masing daerah. Oleh karena itu kebijaksanaan untuk mengurangi tingkat sentralisasi, baik dalam pengalokasian dana maupun dalam pengelolaan proyek pembangunan sangat diperlukan. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan wewenang dan ruang gerak pemerintahan daerah lebih luas dan seimbang. Secara lebih konkrit sangat perlu diupayakan agar alokasi dana untuk proyek-proyek INPRES dan APBD lebih seimbang jumlahnya bila dibandingkan dengan alokasi dana untuk proyek sektoral. Kebijaksanaan ini

direkomendasikan, mengingat pengalokasian dana Inpres lebih banyak didasarkan atas azas pemerataan. Aziz (1993) menemukan dalam penelitiannya bahwa bantuan dalam bentuk Inpres memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan kebijaksanaan bahwa bantuan dalam bentuk "spesific grand" perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Implikasi lain dari penemuan ini adalah sangat perlu diupayakan tenaga perencana yang berkualitas pada setiap daerah. Tenaga tersebut diharapkan mampu membuat format perencanaan daerah dengan analisa yang lengkap dan menyakinkan sehingga daerah memiliki **bargaining position yang relatif tinggi dalam merebut** dana pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Kebijaksanaan konkrit untuk itu adalah memberikan peluang kepada stafnya untuk melanjutkan studi terutama sekali program studi yang berkaitan dengan ilmu perencanaan wilayah.

### 3. Analisa Potensi Pembangunan Per Wilayah Tingkat II di Sumatera Barat.

Data yang disajikan pada Tabel 5 . hanya menunjukkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pembangunan yang cukup berarti bagi wilayah Sumatera Barat. Oleh karena itu arah dan kebijaksanaan pembangunan wilayah harus ditujukan kepada empat sektor ekonomi tersebut. Bukan berarti sektor lainnya diabaikan. tetapi dengan pengembangan sektor yang utama

tersebut dalam proses selanjutnya diharapkan dapat menarik perkembangan sektor lainnya.

Propinsi Sumatera Barat secara administrasi pemerintahan terdiri dari 14 daerah tingkat II. Masing-masing daerah tingkat II tersebut ditinjau dari aspek tata ruang wilayah cenderung mempunyai potensi wilayah yang relatif berbeda. Berkaitan dengan hal ini. analisa potensi wilayah untuk setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat perlu dilakukan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai input dalam merumuskan kebijaksanaan pengembangan sektor ekonomi pada wilayah masing-masing. Analisa tentang hal ini disajikan pada Tabel 7.

Berdasarkan Tabel 7 , ditemukan bahwa untuk setiap wilayah tingkat II di Sumatera Barat, memiliki potensi pembangunan yang berbeda. Namun kecenderungan data menunjukan bahwa setiap daerah kabupaten di Sumatera Barat, sektor pertanian merupakan sektor ekonomi basis, karena nilai indeks LQ nya besar dari satu. Dengan demikian sektor pertanian memiliki potensi pembangunan yang cukup berarti dan layak mendapat prioritas dalam pengembangannya. Dengan kata lain potensi pembangunan daerah kabupaten adalah pada sektor pertanian. Penemuan ini memberikan indikasi bahwa propinsi Sumatera Barat sangat potensial sekali dalam pengembangan sektor pertanian, termasuk didalamnya sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan , perikanan dan peternakan.

Tabel 7. Indeks LQ Sektor Ekonomi Per Daerah Tingkat II di Sumatera Barat Tahun 1987 - 1991

| Daerah | Sektor-Sektor Ekonomi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Kabupaten | | | | | | | | |
| 1. Pes. Selatan | 1.45 | 0.43 | 0.60 | 0.73 | 1.14 | 0.24 | 0.40 | 0.73 |
| 2. Sawalunto Sijunjung | 1.40 | 0.94 | 0.71 | 1.52 | 0.88 | 0.50 | 0.44 | 0.82 |
| 3. Tanh Datar | 1.32 | 0.37 | 0.94 | 0.71 | 0.99 | 0.67 | 0.55 | 0.76 |
| 4. Pdg Pariaman | 1.44 | 0.31 | 0.65 | 0.55 | 1.11 | 0.53 | 0.36 | 0.78 |
| 5. Agam | 1.34 | 0.37 | 1.05 | 0.82 | 1.03 | 0.42 | 0.09 | 0.73 |
| 6. 50 Kota | 1.28 | 0.41 | 1.48 | 0.59 | 0.85 | 0.33 | 0.10 | 0.81 |
| 7. Pasaman | 1.55 | 0.47 | 0.43 | 0.80 | 1.13 | 0.38 | 0.35 | 0.62 |
| 8. Solok | 1.52 | 0.46 | 0.51 | 0.86 | 0.87 | 0.51 | 0.36 | 0.76 |
| B. Kotamadya | | | | | | | | |
| 1. Padang | 0.26 | 0.48 | 1.57 | 1.29 | 1.82 | 1.96 | 2.31 | 1.34 |
| 2. Solok | 0.55 | 0.85 | 0.43 | 2.08 | 0.51 | 1.00 | 2.06 | 2.86 |
| 3. Sawahlunto | 0.06 | 6.79 | 0.26 | 1.44 | 0.39 | 1.00 | 0.37 | 0.86 |
| 4. Pdg. Panjang | 0.55 | 0.51 | 0.57 | 1.21 | 0.52 | 2.40 | 1.26 | 2.13 |
| 5. Bukittinggi | 0.25 | 0.53 | 0.94 | 1.57 | 0.99 | 2.29 | 1.60 | 1.54 |
| 6. Payakumbuh | 0.63 | 0.35 | 0.69 | 0.93 | 1.43 | 1.14 | 1.50 | 0.99 |

Sumber: Diolah dari data PDRB Per Wilayah Tingkat II di Sumatera Barat.

Keterangan: 1 = Sektor Pertanian.
2 = Pertambangan
3 = Industri.
4 = Listrik. Gas. Air Minum dan Bangunan.
5 = Perdagangan, Hotel dan Restoran.
6 = Angkutan dan Komunikasi.
7 = Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
8 = Pemerintahan dan Jasa.

Implikasi kebijaksanaannya adalah pada masa mendatang setiap daerah kabupaten di Sumatera Barat dalam merancang perencanaan pembangunan wilayahnya harus memberikan prioritas pengembangan kepada sektor pertanian. karena sektor inilah yang merupakan sektor dan penggerak utama dalam struktur perekonomian wilayah.

Kecenderungan lain yang ditemukan pada Tabel 7 adalah mengenai daerah kotamadya. Pada daerah kotama-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

dya di Sumatera Barat, yang merupakan sektor basis dan potensi pembangunan yang cukup berarti adalah sektor Listrik, Gas, Air Minum dan Bangunan, sektor Angkutan/ Komunikasi, sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya sektor Pemerintahan dan Jasa serta perdagangan hotel dan restoran. Dengan demikian daerah kotamadya di Sumatera Barat memiliki potensi pembangunan pada sektor Jasa. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan kondisi wilayah daerah tersebut, yang pada umumnya daerah ibu kota kabupaten dan berfungsi sebagai pusat perdagangan bagi wilayahnya masing-masing. Temuan ini dapat merekomendasikan bahwa setiap pemerintah daerah kotamadya di Sumatera Barat harus memberikan prioritas utama dalam pengembangan sektor jasa (termasuk didalamnya Perdagangan, Angkutan, Bank, Komunikasi). Bagi daerah kotamadya Padang, selain potensial dalam pengembangan sektor perdagangan, angkutan, bank dan komunikasi, juga potensial dalam pengembangan sektor industri. Hal ini barangkali ada kaitannya dengan keberadaan PT. Semen Padang di wilayah kotamadya Padang. Berdasarkan data yang dideskripsikan sebelumnya, bahwa PT. Semen Padang memberikan konstribusi yang relatif besar dalam pembentukan nilai tambah sektor industri secara keseluruhan.

Daerah kotamadya lainnya yang mempunyai potensi pembangunan selain sektor jasa adalah kotamadya Sawahlunto. Daerah ini juga memiliki sektor basis dalam bidang pertambangan. Kondisi yang demikian barangkali

ada kaitannya dengan keberadaan tambang batu bara di wilayah tersebut. Dengan demikian daerah kotamadya Sawahlunto, disamping memprioritaskan pengembangan sektor jasa, juga sangat potensial bagi pengembangan sektor industri dan pertambangan.

Analisa data pada Tabel 7 di atas, memberikan indikasi bahwa untuk setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat mempunyai sektor ekonomi yang potensial dan dapat berperan sebagai penggerak utama dalam struktur perekonomian wilayah. Ternyata pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat memiliki lebih dari satu sektor ekonomi yang dapat berperan sebagai sektor basis. Gambaran tentang hal ini disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 memberikan indikasi kepada kita bahwa setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat harus merancang perencanaan pembangunannya sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing, artinya memberikan prioritas pengembangan terhadap sektor ekonomi yang tergolong sebagai sektor basis dalam struktur perekonomian wilayah. Dengan format perencanaan yang sesuai dengan potensi wilayah, diharapkan sumberdaya pembangunan wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Pembangunan Dalam Bidang Sosial

Profil pembangunan wilayah Sumatera Barat yang dijelaskan pada bagian terdahulu, perlu dicek dengan aspek pembangunan dalam bidang sosial. Aspek ini biasanya diukur dengan Indeks Kualitas Fisik Kehidupan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

(PQLT) dan penduduk usia 7 -12 tahun yang memasuki sekolah. Hal ini perlu dilakukan, mengingat keberhasilan pembangunan yang diukur dengan pertumbuhan out put

Tabel 8. Sektor Ekonomi Basis Per Wilayah Tingkat II di Sumatera Barat.

| Daerah | Sektor Ekonomi Basis | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kabupaten | | | | | | |
| 1. Pesisir Selatan | 1(1,45) | 5(1,14) | - | - | - | |
| 2. Solok | 1(1,52) | - | - | - | - | |
| 3. Sawahlunto/Sjjg | 1(1,40) | 4(1,52) | - | - | - | |
| 4. Tanah Datar | 1(1,32) | - | - | - | - | |
| 5. Padang Pariaman | 1(1,44) | 5(1,11) | - | - | - | |
| 6. Agam | 1(1,34) | 3(1,05) | 5(1,03) | - | - | |
| 7. 50 Kota | 1(1,28) | 3(1,48) | - | - | - | |
| 8. Pasaman | 1(1,55) | 5(1,13) | - | - | - | |
| B. Kotamadya | | | | | | |
| 1. Padang | 3(1,57) | 4(1,29) | 6(1,96) | 7(2,31) | 8(1,34) | 5(1,82) |
| 2. Solok | 4(2,08) | 6(1,00) | 7(2,06) | 8(2,86) | - | |
| 3. Sawahlunto | 2(4,79) | 4(1,44) | 6(1,00) | - | - | |
| 4. Padang Panjang | 4(1,21) | 6(2,40) | 7(1,26) | 8(2,13) | - | |
| 5. Bukittingi | 4(1,57) | 6(2,29) | 7(1,60) | 8(1,54) | - | |
| 6. Payakumbuh | 5(1,43) | 6(1,14) | 7(1,50) | - | - | |

Sumber : Diolah dari data PDRB per wilayah Tingkat II di-Sumatera Barat.

Keterangan : 1 = Pertanian
2 = Pertambangan
3 = Industri
4 = Listrik
5 = Perdagangan
6 = Angkutan
7 = Bank
8 = Pemerintah & Jasa
( ) Angka dalam kurung nilai indeks LQ

belum tentu selamanya sejalan dengan pembangunan dalam bidang sosial.

Dengan menggunakan Indeks Kualitas Fisik Kehidupan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan dalam bidang sosial, maka peningkatan nilai indeks ini ke arah nilai maksimum menunjukkan terjadinya kemajuan pembangunan dalam bidang sosial. Oleh karena kemajuan pembangunan dalam bidang ekonomi, yang sering

dijadikan sebagai salah satu ukuran adalah pendapatan per kapita. Untuk melihat apakah peningkatan pendapatan per kapita sejalan dengan peningkatan nilai indeks PQLI. maka harus dirangking pendapatan perkapita dan nilai indeks PQLI pada setiap daerah. Kemudian dibandingkan antara rangking pendapatan per kapita dengan rangking indeks PQLI. Jika ditemukan selisih positif berarti pembangunan ekonomi sejalan dengan pembangunan dalam bidang sosial. Sedangkan bila ditemukan selisih negatif menunjukkan pembangunan ekonomi tidak dapat diikuti oleh pembangunan dalam bidang sosial. Untuk keperluan ini data seluruh propinsi di Indonesia harus disajikan. kemudian disajikan pula pendapatan per kapita per propinsi untuk dirangking. Data ini disajikan pada Tabel 9.

Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial pada setiap daerah tingkat I di Indonesia relatif berbeda. Studi ini yaitu hanya melihat profil pembangunan propinsi Sumatera Barat.

Pada Propinsi Sumatera Barat dilihat dari segi keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi (PDRB per kapita) menempati posisi 14 dari 27 propinsi yang ada. Sedangkan pembangunan dalam bidang sosial menempati urutan 17. berarti ditemukan selisih yang negatif. Dilihat dari ukuran ini, angka tersebut dapat ditafsirkan bahwa proses pembangunan dalam bidang ekonomi, yang diukur dengan nilai PDRB per kapita

ekonomi, yang diukur dengan nilai PDRB per kapita kurang sejalan dengan proses pembangunan di bidang sosial. Dengan kata lain PDRB per kapita Sumatera Barat yang relatif tinggi dibandingkan dengan 13 propinsi lainnya (propinsi dengan PDRB per kapitanya .

Tabel 9. PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan dan Indeks Kualitas Fisik Kehidupan Per Propinsi di Indonesia Tahun 1990.

| Propinsi | PDRB/Kapita (Rp.) | Rangking | PQLI | Rangking | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. DI. Aceh | 2.205.285 | 3 | 77 | 7 | -4 |
| 2. Sumatera Utara | 583.047 | 7 | 78 | 5 | 2 |
| 3. Sumatera Barat | 460.687 | 14 | 72 | 17 | -3 |
| 4. Riau | 2.702.887 | 2 | 73 | 15 | -13 |
| 5. Jambi | 418.071 | 17 | 73 | 15 | 2 |
| 6. Sumatera Selatan | 827.316 | 5 | 75 | 10 | - 5 |
| 7. Bengkulu | 391.366 | 19 | 74 | 12,5 | - 6,5 |
| 8. Lampung | 322.120 | 24 | 77 | 7 | 17 |
| 9. DKI Jakarta | 1.670.499 | 4 | 87 | 1 | 3 |
| 10. Jawa Barat | 507.388 | 12 | 71 | 19 | - 7 |
| 11. Jawa Tengah | 427.002 | 16 | 76 | 9 | 7 |
| 12. DI. Yogyakarta | 373.111 | 22 | 83 | 2 | 20 |
| 13. Jawa Timur | 516.783 | 11 | 74 | 12 | - 1 |
| 14. Bali | 579.526 | 8 | 75 | 10 | - 2 |
| 15. Nusa Tanggara Barat | 239.699 | 25 | 56 | 26 | - 1 |
| 16. Nusa Tenggara Timur | 219.201 | 26 | 68 | 23 | 3 |
| 17. Kalimatan Barat | 490.390 | 13 | 69 | 22 | - 9 |
| 18. Kalimatan Tengah | 556.888 | 9 | 77 | 7 | 2 |
| 19. Kalimatan Selatan | 529.867 | 10 | 77 | 17 | - 7 |
| 20. Kalimatan Timur | 3.161.136 | 1 | 79 | 3 | - 2 |
| 21. Sulawesi Utara | 388.240 | 21 | 79 | 3 | -18 |
| 22. Sulawesi Tengah | 342.872 | 23 | 67 | 24 | - 1 |
| 23. Sulawesi Selatan | 390.093 | 20 | 71 | 19 | 1 |
| 24. Sulawesi Tenggara | 394.100 | 18 | 70 | 21 | - 3 |
| 25. Maluku | 458.499 | 15 | 73 | 15 | 0 |
| 26. Irian Jaya | 701.083 | 6 | 65 | 25 | -19 |
| 27. Timur-Timur | 189.065 | 27 | 53 | 27 | 0 |

Sumber : Biro Pusat Statistik, Pendapatan Antar Propinsi, 1993

di bawah Rp.460.687) kurang berhasil dalam meningkatkan angka harapan hidup masyarakat (expectation of life) dan menekan tingkat kematian bayi. Masih rela-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

dengan propinsi lainnya (propinsi dengan indeks PQLI di atas 72), mungkin disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran mayarakat dalam memelihara kesehatannya. Dugaan ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa masih banyak di antara anggota masyarakat yang enggan memanfaatkan fasilitas kesehatan (Puskesmas) yang telah disediakan oleh pemerintah. Mereka masih banyak percaya dengan dukun kampung. Bila dugaan ini benar, maka sangat perlu suatu upaya kebijaksanaan untuk mengintensifkan penyuluhan dalam bidang kesehatan. Sehingga masyarakat lebih tahu dan sadar akan pentingnya arti kesehatan. Sebetulnya institusi yang menunjang untukk itu telah diciptakan oleh pemerintah seperti adanya bidan desa dan Posyandu. Institusi ini sangat efektif sekali jika difungsikan sesuai dengan misinya. Namun di pedesaan kelihatannya Posyandu dan bidan-bidan desa tersebut kurang dimanfaatkan oleh aparat pedesaan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Posyandu bukan hanya sekedar melakukan perlombahan bayi sehat, tetapi yang lebih penting sekali adalah bagaimana merubah prilaku yang mencerminkan hidup sehat. Hal tersebut barangkali yang belum terkondisikan dalam masyarakat.

Ukuran lain yang sering dijadikan sebagai ukuran dalam melihat aspek sosial dalam proses pembangunan adalah persentase penduduk yang berumur 7 - 12 tahun yang masuk sekolah. Dilihat dari aspek ini, data menujukkan bahwa pada tahun 1980, 1988, 1982 persen-

tase total penduduk Sumatera barat yang berumur 7 - 12 tahun telah masuk sekolah selalu meningkat yaitu sebanyak 88,82% pada tahun 1988. Jumlah ini meningkat menjadi 95,7 % pada tahun 1985 dan meningkat lagi menjadi 96,89 % pada tahun 1990 (Kantor Statistik Sumatera Barat, Indikator Sosial, 1993). Angka tersebut memperlihatkan bahwa aspek pembangunan bidang pendidikan dapat dikatakan lebih baik, karena angka ini berada di atas angka nasional (94,0 %). Namun angka tersebut perlu diwaspadai, karena bila diperhatikan perkembangan dari tahun 1980 (88,82 %) ke tahun 1985 (95,7 %) terjadi peningkatan sebesar 7,75 %. Sedangkan perkembangan dari tahun 1985 - 1990, hanya meningkat sebesar 1,24 %. Bila perkembangan tersebut tidak mengalami perubahan, berarti diperlukan waktu 4 tahun lagi, agar seluruh penduduk usia 7 - 12 tahun masuk sekolah.

Satu hal yang menarik dari penemuan ini adalah terjadinya penurunan perkembangan penduduk usia 7 - 12 tahun yang masuk sekolah periode 1980 - 1985 (7,75 %) dan 1985 - 1990 (1,24%). Sementara dibandingkan periode 1980 - 1985 dan periode 1985 - 1990, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan jauh lebih baik pada periode 1985 - 1990 seperti subsidi terhadap peserta didik dalam bentuk pembebasan SPP. Data ini dapat ditafsirkan bahwa terjadinya penurunan kepedulian masyarakat dalam bidang pendidikan. Dugaan ini sangat perlu dibuktikan secara empiris

dalam menentukan variabel apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut, mengingat pendidikan merupakan variabel kunci dalam mempercepat proses kemajuan bangsa dan negara.

**5. Indeks Ketimpangan Wilayah**

Masalah pemerataan dalam proses pembangunan wilayah merupakan aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan, disamping aspek pertumbuhan dan pengangguran. Secara teori aspek tersebut dapat diukur dengan menggunakan indeks Gini dan indeks Williamson. Kedua jenis indeks ini menggunakan variabel yang berbeda dalam mengukur pemerataan. Indeks Gini menggunakan data pendapatan rumah tangga, sedangkan indeks Williamson menggunakan data pendapatan wilayah. Oleh karena data yang digunakan berbeda dalam menghitung ke dua jenis indeks tersebut, maka implikasi penemuan dan rekomendasi yang dihasilkan juga relatif berbeda. Sesuai dengan tujuan studi, pada Tabel 10 berikut disajikan hasil perhitungan indeks Williamson dari tahun 1970 - 1990.

Hasil perhitungan pada Tabel 10, menunjukkan bahwa secara umum nilai indeks ketimpangan pembangunan wilayah Sumatera Barat jauh lebih rendah dari nilai indeks ketimpangan pembangunan wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Hasil penelitian ini dapat memberikan indikasi bahwa pemerataan pembangunan di Sumatera Barat ternyata relatif

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

taan pembangunan di Sumatera Barat ternyata relatif lebih baik dibandingkan dengan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Relatif baiknya pemerataan pembangunan wilayah di Sumatera Barat mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Baik berupa faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi.

Dari segi ekonomi. unsur utama yang diduga paling menentukan adalah struktur perekonomi wilayah. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah struktur perekonomian

Tabel 10. Perkembangan Indeks Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Sumatera Barat, Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Secara Keseluruhan Tahun 1970 - 1990.

| Tahun | Sumatera Barat * | Indonesia Bagian Barat** | Indonesia Keseluruhan** |
|---|---|---|---|
| 1970 | 0,11 | 0,40 | 0,27 |
| 1971 | 0,12 | 0,41 | 0,25 |
| 1972 | 0,12 | 0,42 | 0,28 |
| 1973 | 0,12 | 0,48 | 0,36 |
| 1974 | 0,11 | 0,46 | 0,39 |
| 1975 | 0,10 | 0,42 | 0,32 |
| 1976 | 0,10 | 0,40 | 0,35 |
| 1977 | 0,09 | 0,43 | 0,28 |
| 1978 | 0,07 | 0,41 | 0,23 |
| 1979 | 0,06 | 0,43 | 0,27 |
| 1980 | 0,07 | 0,41 | 0,27 |
| 1981 | 0,07 | 0,43 | 0,25 |
| 1982 | 0,07 | 0,50 | 0,24 |
| 1983 | 0,08 | 0,51 | 0,24 |
| 1984 | 0,04 | 0,49 | 0,23 |
| 1985 | 0,05 | 0,47 | 0,20 |
| 1986 | 0,05 | 0,47 | 0,20 |
| 1987 | 0,05 | 0,46 | 0,20 |
| 1988 | 0,04 | | |
| 1989 | 0,04 | | |
| 1990 | 0,04 | | |

Sumber : * Diolah dari hasil penelitian 1994
** Syafrizal (1992)

yang tidak begitu bersifat dualistis. Artinya interaksi antara sektor tradisional dan sektor modern atau interaksi antara ekonomi desa dan kota dapat berjalan

terwujudnya pertumbuhan yang relatif seimbang antara kedua sektor tersebut. Dibandingkan dengan Indoensia Bagian Timur seperti Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur kondisinya mungkin relatif berbeda . Dugaan ini didasarkan atas kenyataan yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa penduduk Sumatera Barat jiwa kewiraswastaannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Indonesia lainnya. Buktinya banyak penduduk Sumatera Barat bergerak disektor perdagangan baik di kota maupun di desa. Banyak penduduk pedesaan disamping bergerak disektor tradisional, tetapi juga bergerak disektor modern. Hal inilah yang meningkatkan interaksi antara desa dan kota berjalan relatif baik.

Faktor lain yang memungkinkan relatif baiknya pemerataan pembangunan di Sumatera Barat adalah sektor sosial budaya. Sosial budaya yang dimaksudkan disini berupa pemilikan asset produktif (lahan pertanian) di pedesaan. Di Sumatera Barat pemilikan asset produktif tersebut tidak begitu terkonsentrasi pada sekelompok masyarakat tertentu. Sebahagian besar tanah/lahan pertanian merupakan tanah ulayat dan dikenal sebagai pusaka tinggi. Tanah tersebut tidak mudah diperjualbelikan dan semua anggota kaum mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkannya, terutama sekali diperuntukan bagi anggota keluarga yang kurang mampu. Dengan kondisi sosial budaya yang demikian, setiap anggota masyarakat paling kurang mempunyai tanah yang dapat

digunakannya dalam menciptakan arus pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bila ditelusuri lebih jauh, ternyata data pada Tabel 10 di atas memperlihatkan bahwa antara tahun 1970-1980 ketimpangan pembangunan antar wilayah di Sumatera Barat selalu berfluktuasi, walaupun secara keseluruhan masih tergolong merata. Namun mulai tahun 1980 - 1990, ketimpangan pembangunan tersebut menunjukkan tendensi yang semakin baik. Artinya nilai Indeks Williamson pada periode tersebut selalu menurun. Data ini dapat memberikan petunjuk bahwa studi ini dapat membuktikan kebenaran prediksi teori pertumbuhan Neo Classic yang menyatakan, pada awal proses pembangunan ketimpangan pembangunan wilayah cenderung meningkat. dalam studi ini ditemukan pada periode 1970 - 1980. Akan tetapi dalam proses pembangunan selanjutnya dimana kemajuan telah semakin meningkat, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah secara bertahap akan menurun. dalam studi ini ditemukan pada periode 1980 - 1990. Berdasarkan hasil perhitungan indeks Williamson pada Tabel 10 di atas, Proposisi Neo Classic dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2: Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat

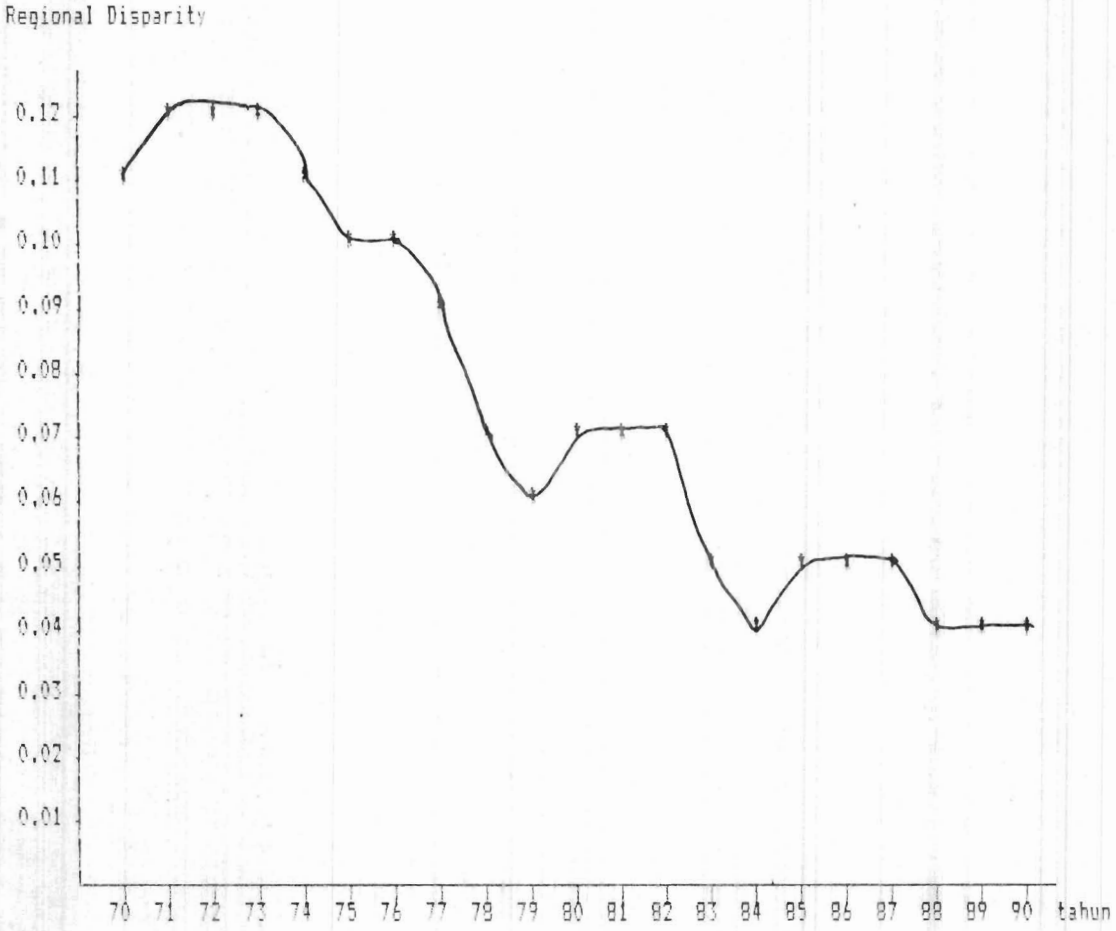

# BAB V

# KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data pada bagian terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selalu menunjukkan peningkatan selama periode Pelita II sampai Pelita V tahun kedua.
2. Pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Sumatera Barat selalu berfluktuasi selama periode analisa, tidak satupun sektor ekonomi yang menunjukkan tendensi yang selalu meningkat.
3. Selama periode Pelita II sampai Pelita V tahun kedua, proses transformasi ekonomi di Sumatera Barat belum menunjukkan suatu pola yang jelas dan mantap.
4. Dengan menggunakan Klassen Typologi, pada umumnya daerah kotamadya di Sumatera Barat termasuk daerah maju dan tumbuh cepat. Sedangkan daerah kebupaten sebagian besar termasuk klasifikasi daerah kurang berkembang.
5. Ada empat sektor ekonomi di Sumatera Barat yang tergolong sebagai sektor basis yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restouran, angkutan dan komunikasi serta sektor pemerintahan dan jasa.
6. Sektor pertanian merupakan sektor basis pada setiap daerah kabupaten di Sumatera Barat. Sedangkan pada daerah kotamadya yang merupakan sektor basis adalah



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

sektor listrik, angkutan, Bank, dan sektor jasa.

7. Pembangunan dalam bidang ekonomi di Sumatera Barat kelihatannya kurang diikuti oleh peningkatan pembangunan dalam bidang sosial. Hal ini ditandai oleh pendapatan per kapita yang relatif tinggi, namun diikuti oleh indeks PQLI yang relatif rendah.
8. Ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat relatif rendah dan secara keseluruhan dapat membuktikan teori pertumbuhan Neo Classic.

B. Implikasi Kebijaksanaan

Studi ini menemukan bahwa proses transformasi ekonomi di Sumatera Barat selama periode analisa belum menunjukan suatu pola yang jelas. Implikasi kebijaksanaannya adalah sangat perlu dirumuskan kebijaksanaan konkrit untuk meningkatkan konstribusi sektor industri terhadap pembentukan pendapatan wilayah Sumatera Barat. Kebijaksanaan pengembangan dan pembinaan yang terarah dan terpadu terutama sekali terhadap industri skala kecil dan kerajinan rumah tangga perlu diupayakan.

Dalam struktur perekonomian Sumatera Barat, hanya terdapat empat sektor ekonomi yang berperan sebagai sebagai sektor basis. Dari aspek tata ruang wilayah berarti ke empat sektor ekonomi tersebut harus diprioritaskan pengembangannya. Implikasi kebijaksanaan penemuan ini adalah sangat perlu diupayakan kebijaksa-

naan yang jelas dan terarah dalam rangka mengembangkan ke empat sektor ekonomi tersebut. Oleh karena itu pengembangan sumberdaya manusia yang berfungsi sebagai pengmabil keputusan pada ke empat sektor ekonomi tersebut sangat perlu dilakukan. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya manusia dengan kualifikasi perencana. Pada gilirannya hal ini akan dapat menghasilkan format perencanaan yang relatif tepat.

Implikasi lain dari hasil studi ini adalah bahwa setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat harus menata perekonomiannya sesuai dengan potensi wilayah-nya masing-masing. Artinya setiap wilayah tingkat II harus memperioritaskan pengembangan sektor ekonomi yang tergolong sebagai sekotr basis. Dengan adanya prioritas ini, berarti setiap wilayah telah berpro-duksi sesuai dengan potensi wilayahnya. Pada giliran-nya hal ini akan dapat melahirkan efisiensi berproduk-si sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang relatif tinggi.

Pembangunan dalam bidang sosial di Sumatera Barat kelihatannya kurang sejalan dengan pembangunan dalam bidang ekonomi. Penemuan ini memberikan implikasi bahwa sangat perlu diupayakan kebijaksanaan dalam bidang penyuluhan kesehatan terhadap anggota masyara-kat. Artinya institusi yang telah diintrodusir oleh pemerintah seperti Posyandu, Karang Taruna dan PKK perlu difungsikan. Rekomendasi ini didasarkan atas

kenyataan bahwa masyarkat kelihatannya masih banyak berprilaku yang kurang sesuai dengan kriteria kesehatan. Buktinya masih banyak masyarakat yang enggan untuk memanfaatkan fasiltas kesehatan (Puskesmas) dan kalau mereka sakit cenderung berobat ke dukun-dukun.

Dengan kebijaksaanaan ini diharapkan tingkat kematian bayi dan umur harapan hidup masayarakat relatif baik, sehingga indeks PQLI di Sumatera Barat menjadi relatif tinggi.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

## DAFTAR PUSTAKA


Ahluwalia, 1976, Income Inequality: Some Dimensions of the Problem, dalam *Redistribution with Growth*, Oxford University Press, London.

Bendavid, 1991, Regional and Local Economics Analysis for Practitioner, Praeger Punlishers, New York.

Borts, George H., 1960. The Equalisation of Return and Regional Grawth. *The American Economic Review*, New York.

BPS, 1990, Pendapatan Regional Sumatera Barat, Kerjasama BAPPEDA Tingkat I Sumatera Barat dengan Kantor Statistik Sumatera Barat.

Chenery, H. B., 1960, Redistribution of Growth, Oxford University Press, London.

Glasson, 1974, An Introduction to Regional Planning, Hutchinson, London.

Hoover, 1977, Pengantar Ekonomi Regional, terjemahan A. Chandra, FE-UI, Jakarta.

Jhingan, M.L., 1993, Ekonomi Pembangunan Perencanaan, (Terjemahan Oleh D. Guritno, S.H.), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kuznets, Simon, 1963, Economic Growth and Income Inequality, dalam *The American Economic Review*, New York.

Papanek, GF, 1977, The Poor in Jakarta, Memeographed, Jakarta.

Richardson, 1977, Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, terjemahan Paul Sihotang, FE-UI, Jakarta.

Sandy, I Made, 1982, Pembangunan Wilayah, Direktorat Tata Guna Tanah, Ditjen Agraria, Jakarta.

Syafrizal, 1990, Pola Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah di Indonesia: Suatu Gagasan EKI, FE-UI, Jakarta.

Sukirno, 1979, Pembangunan Wilayah, FE-UI, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1986, Teori, Strategi Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta.

Todaro, Michael P., 1978, Economic Development in The Third World, Longman, London.

Ul Haq, Mahbub, 1979, The Poverty Curtain, University Press, Columbia.

Williamson, Jeffrey G., 1965, Regional Inequality and The Process of National Development: A Description of The Pattens, Economic Development and Cultural Change, Chicago Press, New York.

Bahan-Bahan Kuliah Ekonomi Pembangunan, pada program Perencanaan Pembangunan Pascasarjana UNAND Semester Juli - Desember 1994.